PENGARUH IMPOR KAPAL PERANG JENIS *STRATEGIC SEALIFT VESSEL* TERHADAP KERJA SAMA MILITER FILIPINA-INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam Bidang Hubungan Internasional

Oleh:
M Fuad Hasan Al Farizi
NIM I02216018

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya
2023

PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Fuad Hasan Al Farizi

NIM : I02216018

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Pengaruh Impor Kapal Perang Jenis *Strategic Sealift Vessel* Terhadap Kerja Sama Militer Filipina-Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya ,17 Januari 2023

Yang Menyatakan

M. Fuad Hasan Al Farizi

NIM I02216018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M. Fuad Hasan Al Farizi
NIM : I02216018
Program Studi : Hubungan Internasional

yang berjudul: "**Pengaruh Impor Kapal Perang Jenis *Strategic Sealift Vessel* Terhadap Kerja Sama Militer Filipina-Indonesia**", saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya 17 Januari 2023
Pembimbing

Nur Luthfi Hidayatullah,SIP,M.Hub.int
NIP 199104092020121012

PENGESAHAN

Skripsi oleh M. Fuad Hasan Al Farizi dengan judul: "**Pengaruh Impor Kapal Perang Jenis *Strategic Sealift Vessel* Terhadap Kerja Sama Militer Filipina-Indonesia**" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

Rizki Rahmadini Nurika,S.Hub.Int.,M.A.
NIP 199003252018012001

Penguji II

Nur Luthfi Hidayatullah,S.IP.,M.Hub.Int.
NIP 199104092020121012

Penguji III

M.Jave Zulkarnaen,MA
NUP 202111003

Penguji IV

.Ridha Amaliyah S.IP,MBA
NUP 201409001

Surabaya, 17 Januari 2023

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan

Dr. Abdul Chalik, M.ag.
NIP. 197306272000031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. FUAD HASAN ALFARIZI
NIM : I02216018
Fakultas/Jurusan : FISIP/HUBUNGAN INTERNASIONAL
E-mail address : nm475213@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

PENGARUH IMPOR KAPAL PERANG JENIS *STRATEGIC SEALIFT VESSEL* TERHADAP KERJA SAMA MILITER FILIPINA-INDONESIA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Januari 2023

Penulis

(M. Fuad Hasan AlFarizi)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRACT

M. Fuad Hasan Al Farizi *,2023*, *The Effect of Strategic Sealift Vessel Import on Philippines-Indonesia Military Cooperation, Undergraduate Thesis of the International Relations Study Program, Faculty of Social and Political Sciences UIN Sunan Ampel Surabaya.*
Keywords: *The Effect of import, Warships type of Strategic Sealift Vessel, military cooperation.*

This research discusses the Philippines-Indonesia military cooperation which is motivated by the tender of warships by the Philippines to add defense equipment. This study aims to find out how the import of Strategic Sealift Vessel type warships affects Philippine-Indonesian military cooperation.The method used is a qualitative descriptive method with documentation data collection techniques and literature studies. The theory used to analyze is the theory of international trade and military cooperation. The conclusion in this study is that Philippines-Indonesia cooperation before the import of Strategic Sealift Vessel type warships is only motivated by international politics and security aimed at protecting against internal and external threats. Meanwhile, Philippines-Indonesia cooperation after the import of Strategic Sealift Vessel type warships is motivated by economy, international politics and security. It was discovered that the Philippines held a tender for a warship won by Indonesia worth USD 90 million in 2014, then agreed on an MoU cooperation containing logistics and defense industry cooperation with a commitment to improving the economy related to the arms industry in 2016.Then continued on the signing of a contract to buy and sell Strategic Sealift Vessel type warships and a JDSCC cooperation agreement in the field of defense and security in 2021.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

ABSTRAK

M. Fuad Hasan Al Farizi, 2023, Pengaruh Impor Kapal Perang Jenis *Strategic Sealift Vessel* Terhadap Kerja Sama Militer Filipina-Indonesia, Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: Pengaruh,Impor,Kapal Perang Jenis *Strategic Sealift Vessel,*Kerja Sama Militer.

Penelitian ini membahas tentang kerja sama militer Filipina-Indonesia yang dilatarbelakangi oleh tender kapal perang oleh Filipina untuk menambah alutsista pertahanan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh impor kapal perang jenis *Strategic Sealift Vessel* terhadap kerja sama militer Filipina-Indonesia.Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan studi literatur.Teori yang digunakan untuk menganalisa adalah teori perdagangan internasional dan kerja sama militer.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kerja sama Filipina-Indonesia sebelum impor kapal perang jenis *Strategic Sealift Vessel* hanyalah bermotif politik dan keamanan internasional yang bertujuan untuk melindungi dari ancaman internal maupun eksternal.Sedangkan kerja sama Filipina-Indonesia setelah impor kapal perang jenis *Strategic Sealift Vessel* bermotif ekonomi,politik dan keamanan internasional.Ditemukan fakta bahwa Filipina mengadakan tender kapal perang yang dimenangkan oleh Indonesia yang bernilai USD 90 Juta pada tahun 2014,lalu menyepakati kerja sama MoU yang berisi tentang kerjasama logistik dan industri pertahanan dengan komitmen peningkatan ekonomi yang berkaitan dengan industri persenjataan pada tahun 2016.Kemudian berlanjut pada penandatanganan kontrak jual beli kapal perang jenis *Strategic Sealift Vessel* dan kesepakatan kerja sama JDSCC dibidang pertahanan dan keamanan pada tahun 2021.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

E. Tinjauan Pustaka 10

F. Argumentasi Utama 22

G. Sistematika Pembahasan 23

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL **25**

A. Perdagangan Internasional 25

B. *Strategic Sealift Vessel* (SSV) 27

C. Kerja sama Internasional 28

D. Kerja Sama dalam Bidang Militer 31

BAB III METODE PENELITIAN **39**

A. Jenis Penelitian 39

B. Teknik Pengumpulan Data 40

C. Teknik Analisis Data 42

D. Teknik Pengujian Keabsahan Data 47

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 50

A. Kerja Sama Filipina-Indonesia Sebelum Adanya Impor Kapal Perang Jenis *Strategic Sealift Vessel* 50

B. Tender Kapal Perang Jenis *Strategic Sealift Vessel* Oleh Filipina 52

C. Kerja Sama Filipina-Indonesia MoU dalam Bidang Logistik dan Industri Pertahanan 66

D. Kerja Sama Filipina-Indonesia JDSCC dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan 86

BAB V PENUTUP 99

A. Kesimpulan..... 99

B. Saran..... 100

DAFTAR PUSTAKA..... 101

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah negara yang apabila kondisi geografis atau strategisnya berada di dalam kawasan kepulauan dengan lautan yang lebih luas daripada daratan disebut sebagai negara maritim. Salah satu negara maritim yakni Filipina, yang berada di tepi pantai Tenggara Asia. Filipina sebagian besar kawasannya berupa pulau kecil dan tidak berpenghuni. Sedangkan penduduk negara ini umumnya bertempat tinggal di pulau besar Luzon dan Mindanao dengan luas wilayah lebih dari dua per-tiga negara Filipina sendiri.[1] Fakta ini tentu saja mempengaruhi akses distribusi serta transportasi yang mengharuskan melalui jalur maritim.

Selain itu, wilayah strategis Filipina sangat dekat dengan kawasan Asia Timur yang rawan akan perselisihan, terutama dengan salah satu negara kekuatan besar yakni Tiongkok. Didukung dengan saat ini masih ramai kasus perebutan laut China Selatan antara Tiongkok dan empat negara ASEAN yakni Filipina, Malaysia, Brunei, dan Vietnam yang dilatarbelakangi karena tidak adanya koordinasi secara mendetail mengenai batasan-batasan wilayah di Laut China Selatan. Situasi ini telah medorong perlombaan kekuatan angkatan laut, termasuk penggunaan diplomasi kapal perang oleh setiap negara yang bersangkutan.

[1] Carmelita N. Ericta, "The 2010 Census of Population and Housing Reveals the Philippine Population at 92.34 Million", dalam https://psa.gov.ph/content/2010-census-population-and-housing-reveals-philippine-population-9234-million, diakses pada 1 Juli 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Sejak periode 1970, sudah terjadi perdebatan mengenai kepemilikan area laut kawasan *Sparatyls* dan *Scarbourgh Shoal* yang berada di antara negara Filipina dan Tiongkok. Isu ini kian memanas sejak tahun 2009 di mana Tiongkok secara terang-terangan mengklaim kepemilikan atas seluruh area kawasan Laut China Selatan.[2] Atas sebab tesebut saat ini Filipina sebagai negara dengan kondisi geografis terdekat dengan Tiongkok mulai gencar mengamankan area maritimnya serta memperkuat pertahanan guna untuk mengantisipasi ancaman dari berbagai pihak. Isu keamanan saat ini menjadi fokus utama Filipina karena situasi krusial ini perlu meningkatkan pertahanan negara, di bawah kendali sistem pemerintahan Presiden Duterte keamanan Filipina meningkat pesat.[3]

Filipina merupakan negara kepulauan yang memiliki total luas wilayah ± 300.000 km^2, dengan luas darat 298.170 km^2 dan luas perairan 1.830 km^2. Menjadi sebuah negara kepulauan, membuat Filipina tidak memiliki perbatasan darat, dan akses keluar masuk di Filipina didominasi oleh jalur maritim. Sehingga, Filipina memiliki permasalahan berupa tantangan mengenai wilayah perbatasan yang sering kali digunakan sebagai pintu masuk teroris dan penyelundupan senjata. Ancaman yang secara umum berasal dari aktor negara seperti sengketa perbatasan antar-negara yang belum terselesaikan, perlombaan senjata Angkatan Laut (*naval arms race*) dan masalah kebebasan penggunaan laut. Sedangkan ancaman yang muncul dari

[2] Nio Joe Lan, *Tiongkok Sepanjang Abad* (Jakarta: Balai Pustaka, 1952), 97.
[3] Wikanto Arungbudoyo, "Keamanan Filipina Diklaim Meningkat di Bawah Pemerintahan Duterte", dalam https://news.okezone.com/read/2017/07/02/18/1726845/keamanan-filipina-diklaim-meningkat-di-bawah-pemerintahan-duterte, diakses pada 1 Juli 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

aktor non-negara tidak dapat dibatasi pada kesenjataan dan moral, seperti perompakan, pembajakan, terorisme, maritim, proliferasi senjata pemusnah massal dan pencurian sumber daya laut. Serta kejahatan di maritim kini telah menjadi perhatian semua negara di kawasan, karena dipandang dapat mengancam stabilitas kawasan.[4]

Terkait indikator keamanan suatu negara, maka instrumen pertahanan sangat diperlukan guna mempertahankan diri dari segala resiko ancaman dari luar. Alutsista (alat sistem pertahanan utama) mejadi alat yang paling mendukung bagi keamanan Filipina. Banyaknya isu keamanan yang terjadi di wilayah maritim Filipina, tentu menjadi kewajiban untuk memperkuat sistem keamanan maritimnya dengan menambah alutsistanya, salah satunya yakni kapal perang dan persenjataan militer lainnya. Dengan adanya alutsista yang kuat maka sebuah negara dapat memiliki penunjang utama dalam mengatasi berbagai ancaman, utamanya menyangkut keamanan sumber daya laut, penyelundupan imigran gelap, dan adanya sengketa di wilayah perbatasan.

Pada tahun 1993, Indonesia dan Filipina menandatangani MoU *Joint Comission* yang menghasilkan berbagai kesepakatan di bidang pertahanan. Kemudian pada tahun 1997, kedua negara sepakat untuk menandatangani kontrak kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan melalui pendidikan, latihan bersama, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kerjasama logistik dan operasi, komunikasi, teknologi, sistem pendukung

[4] M. Herry Misya, "Efektivitas *Joint Press Statement* dalam Menanggulangi Ancaman Abu Sayyaf di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina", *JOM FISIP* 4 (2), (2017), 2.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

logistik, termasuk layanan dan pemeliharaan. Perjanjian tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi UU Nomor 20 Tahun 2007. Di bidang perbatasan, kerjasama kedua negara telah dilakukan secara efektif melalui beberapa kegiatan, di antaranya: patroli perbatasan, komunikasi, pengaturan lalu lintas perbatasan, dan intelijen dalam *Joint Border Committee* (JBC). Kedua negara telah melakukan kerjasama dalam mengelola ancaman keamanan negara di perbatasan, termasuk penanganan terorisme.[5] Selanjutnya pada tahun 1975, Indonesia dan Filipina menandatangani dua kesepakatan yaitu *Border Patrol Agreement* (BPA) dan *Border Crossing Agreement* (BCA) melalui pertemuan komite perbatasan Republik Indonesia dan Republik Filipina di Manila.[6]

Filipina pertama kalinya dalam sejarah tertarik mengimpor kapal perang yang berjenis *Strategic Sealift Vessel* (SSV) buatan PT Penataran Angkatan Laut (PT PAL) Indonesia. Adanya kegiatan Filipina yang mengimpor kapal perang dari Indonesia ini tentu saja menjadi sebuah dobrakan baru dalam catatan sejarah bidang maritim karena Filipina menjadi negara pertama yang mengimpor kapal perang milik Indonesia. Proyek kapal perang ini tentu saja menjadi hubungan baik antara Filipina dan Indonesia dan patut dibanggakan, karena salah satu alasannya adalah karena Indonesia merupakan negara yang sangat strategis dengan kesamaan identitas dengan Filipina, yakni

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[5] Kementerian Pertahanan RI, "*Indonesian Defence White Paper*", dalam https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/05/2015-INDONESIA-DEFENCE-WHITE-PAPER-ENGLISH-VERSION.pdf, diakses pada 5 Januari 2023.

[6] Endra Kusuma dan Syaiful Anwar, "*Implementation of the Philippines-Indonesia Coordinated Patrol Sea Border Area of Indonesia and the Philippines from the Sea Power Perspective*", *Journal of Social and Political Science*, 3 (4), 1121.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

merupakan negara maritim yang terletak di kawasan Asia Pasifik dan memiliki garis pantai panjang serta kaya akan hasil laut yang perlu untuk dijaga serta diperluas pertahanan lautnya.[7]

Impor kapal perang jenis SSV oleh Filipina dari Indonesia diawali dari Filipina mengadakan tender. Pada tender yang diadakan Filipina tersebut PT PAL Indonesia menjadi pemenang dalam tender yang diadakan oleh Filipina. Pada 2014, sistem pertahanan dan keamanan Kementerian Pertahanan Filipina mengadakan Tender Internasional Pengadaan Kapal Perang yang diikuti oleh Indonesia dan negara Asia lainnya seperti Korea Selatan dan Australia untuk memperkuat pertahanan Filipina. Dalam kesempatan ini, Indonesia yang diwakili oleh PT Penataran Angkatan Laut Indonesia (PT Penataran Angkatan Laut Indonesia adalah perusahan di bawah naungan negara berfokus untuk memproduksi alat utama sistem pertahanan negara (Alutsista) di bagian perkapalan) bersaing dengan penghasil kapal perang negara lain. Tender yang diadakan oleh kementerian pertahanan Filipina bernilai kontrak sebesar USD 90 juta.[8]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Indonesia kemudian memenangkan tender tersebut karena dengan teknologi kapal perang yang canggih tidak kalah dengan negara lain, dan juga dengan bahan produksi pembuatan kapal memiliki kandungan komponen yang baik dan kualitas yang tinggi dan membutuhkan tenaga kerja yang minimal

[7] Rachmi Farmita, "Pertama dalam Sejarah, Indonesia Ekspor Kapal Perang SSV-1", dalam https://bisnis.tempo.co/read/737169/pertama-dalam-sejarah-indonesia-ekspor-kapal-perang-ssv-1, diakses pada 30 Juni 2022.
[8] Valery Fathur Rabbani, "Kerja sama Indonesia dan Filipina Dalam Menghadapi Kasus Pembajakan Kapal di Wilayah Perbatasan Pada Tahun 2016-2018", (Skripsi—Universitas Islam Indonesia, 2019), 93.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

atau pemrosesan yang lebih lanjut untuk membuat bahan jadi atau biasa disebut *Material Intensive,* serta mampu menghadirkan efek kejut atau pendadakan strategis terhadap musuh melalui kapabilitasnya untuk menerjunkan pasukan pendarat tempur secara cepat dan dapat mengangkut 12 unit kendaraan militer serta 621 personel hingga dua unit helikopter, sehingga Filipina memilih Negara Indonesia untuk membuat kapal perang dan berhasil mengalahkan Korea Selatan yang dikenal sebagai negara produsen kapal hingga jet untuk perang.[9]

Atas kemenangan tersebut, Filipina kemudian meminta Indonesia untuk membuat dua kapal perang jenis *Strategic Sealift Vessel* (SSV). Kapal perang jenis SSV atau *Strategic Sealift Vessel* merupakan kapal pendukung operasi militer yang memiliki nilai strategis dengan kapabilitasnya yang menerjukan tentara angkatan darat secara tepat dan masif di pantai di daerah musuh. Kapal SSV mempunyai spesifikasi lebarnya 21,8 meter, panjang 123 meter, kecepatan maksimal 16 knot, bobot 7200 ton, 12 unit kendaraan militer dan dapat membawa maksimal 621 personel serta dapat mengakomodasi 3 helikopter. Kapal perang tipe SSV tersebut dibanderol senilai U$ 45 juta per unit. Kapal perang ini merupakan pengembangan dari kapal perang tipe Landing Platform Dock (LPD-125). Kapal tersebut merupakan kapal yang awalnya dikembangkan bersama Korea Selatan. Namun tenaga ahli PAL melakukan modifikasi sehingga lahirlah kapal tipe SSV. Konten lokal sekitar

[9] Zul, "Menangkan Pesanan Kapal Perang dari Filipina, RI Kalahkan Sang 'Guru'", https://finance.detik.com/industri/d-2812019/menangkan-pesanan-kapal-perang-dari-filipina-ri-kalahkan-sang-guru, diakses pada 16 Agustus 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

35% permesinan masih dari luar. Direktur Utama PT PAL menyatakan bahwa dahulu Indonesia belajar dari Korea ketika TNI AL melakukan pemesanan kapal ke Korea Selatan sebanyak 4 unit, 2 unit dibangun di Korsel dan 2 unit dibangun di PAL. Kemudian terdapat *transfer of technology* untuk memenuhi kebutuhan PAL. Berdasarkan transfer teknologi, PAL membuat kembali yang sejenis, dan dijual ke Filipina.[10]

Hubungan kerja sama antara Indonesia dan Filipina berlanjut pada tahun 2016 dalam sektor keamanan dan industri pertahanan. Kedua negara ini saling berkomitmen meningkatkan ekonomi di masing-masing Negara, dengan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengembangkan kerja sama yang telah dijalin yaitu kerja sama pertahanan dan keamanan dalam bidang pelatihan gabungan militer, pembangunan SDM, saling berbagi informasi, teknologi pertahanan dan penelitian serta pengembangan, modernisasi dan alih teknologi. Hubungan kerja sama Indonesia dan Filipina juga mencakup dalam banyak aspek termasuk pendidikan, ekonomi, dan keamanan. Kedua negara juga telah menandatangani kerja sama *MoU on Basic Education, MoU on Sports Cooperation, MoU on Cooperation in Preventing and Combating Transnational Crimes and Capacity Building, serta Joint Declaration Concerning Maritime Boundary Delimitation*.[11]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[10] Republik Merdeka, "PT PAL Jual 2 Unit Kapal Perang SSV ke Filipina", https://ekbis.rmol.id/read/2014/05/21/156086/pt-pal-jual-2-unit-kapal-perang-ssv-ke-filipina, diakses pada 16 Agustus 2022.

[11] Irfan R Hutagalung, "Kerja sama Keamanan Indonesia Dengan Filipina Dalam Menghadapi Ancaman Kelompok Abu Sayyaf Tahun 2016" (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), 77.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Filipina melakukan kegiatan impor kapal perang dengan jenis SSV yang di buat oleh Indonesia pertama kali pada 8 Mei 2016 melalui proses pelepasan kapal yang dilakukan oleh bapak Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden Indonesia pada saat itu.[12]

Pada tahun 2017, Filipina mengimpor kapal perang kedua jenis *Strategic Sealift Vessel* (SSV) buatan PT PAL Indonesia. Kapal kedua *Strategic Sealift Vessel* (SSV) 123 meter bernama BRP Davao Del Sur-602 yang akan diserahkan kepada Departemen Pertahanan Nasional (DND) Filipina meninggalkan tempat kelahirannya PT PAL Indonesia di Dermaga Ujung Surabaya untuk berlayar selama lima hari mengarungi Laut Jawa, kemudian menyusuri Selat Makassar, memasuki Laut Sulawesi dan Laut Sulu sebelum berlabuh di pangkalannya kelak di Manila, Filipina.

Kemudian untuk ketiga kalinya, PT PAL Indonesia menandatangani kontrak jual beli kapal perang Landing Dock atau jenis SSV oleh CMO PT PAL Indonesia, Wilgo Zainar dengan Menteri Pertahanan Filipina, Delfin N. Lorenzana pada 10 Juni 2022.[13] Di bidang pertahanan dan keamanan, saat ini Indonesia dan Filipina memiliki forum bilateral *Joint Defense and Security Cooperation Committee* (JDSCC) setingkat Dirjen Kemhan. Forum tersebut membahas tantangan keamanan di kawasan, pembaruan kerja sama bilateral kedua negara, industri pertahanan dan kerja sama di kawasan perbatasan.

[12] Petrus Riski, "PT PAL Ekspor Perdana Kapal Perang ke Filipina", dalam https://www.voaindonesia.com/a/pt-pal-ekspor-perdana-kapal-perang-ke-filipina/3320818.html, diakses pada 1 Juni 2022.

[13] Ardan Chandra, "Filipina Beli Kapal Perang BUMN *Made in* Surabaya", https://finance.detik.com/industri/d-6145164/top-banget-filipina-beli-kapal-perang-bumn-made-in-surabaya/1, diakses pada 16 Agustus 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

JDSCC terakhir diadakan secara virtual pada 13 Desember 2021, dimana Indonesia akan menjadi tuan rumah pada forum mendatang di bulan September 2022.

Berdasarkan beberapa hubungan kerja sama yang sempat dilaksanakan antara Filipina dan Indonesia, terlebih terdapat repetitif kerja sama dalam hal jual-beli kapal perang jenis *Strategic Sealift Vessel*, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait motivasi atau hal yang berkaitan dengan kerja sama militer FIlipina-Indonesia. Hal tersebut akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh Impor Kapal Perang Jenis *Strategic Sealift Vessel* Terhadap Kerja Sama Militer Filipina-Indonesia".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini akan dibahas secara terperinci dan sistematis terkait bagaimana pengaruh impor kapal perang jenis SSV terhadap kerja sama militer Filipina-Indonesia?

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh impor kapal perang jenis SSV terhadap kerja sama militer Filipina-Indonesia.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terutama bagi penulis serta akademisi dengan disiplin ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam kasus kerja sama militer.

2. Manfaat Praktis

   a. Pembaca

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang berbeda kepada pembaca terkait kepentingan nasional sebuah negara dalam melakukan kerja sama bilateral.

   b. Penulis

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, menambah pengetahuan serta memperluas wawasan di bidang perdagangan internasional dan kerja sama militer.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Darley Alfian Pratama berjudul "Pengaruh Kerja sama Indonesia-Bangladesh di Bidang Pengkeretaapian Terhadap Pembentukan *Indonesia Bangladesh Preferential Trade Agreement* (IB-PTA) Tahun 2018". Penelitian ini membahas terkait kerja sama Indonesia dan Bangladesh di sektor pengkeretaapian. Bangladesh memilih Indonesia untuk memenuhi kebutuhan transportasi rakyatnya setelah

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

memenangkan tender sebanyak 3 kali yang diadakan oleh *Bangladesh Railway Company*. Kemenangan Indonesia dalam tender tersebut menandakan permulaan adanya hubungan kerja sama Indonesia dan Bangladesh. Kerja sama ini memberikan dampak yang signifikan di bidang pengkeretaapian antara Indonesia dan Bangladesh sehingga menimbulkan ketergantungan (interdependensi).[14]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu kedua penelitian ini membahas tentang hubungan diplomatis kerja sama bilateral ekonomi di bidang perdagangan internasional. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, penelitian ini membahas terkait sudut pandang Bangladesh dan PT INKA Indonesia yang telah berhasil memenangkan tender *Bangladesh Railway Company* dan mendapatkan repetitif ekspor kereta api sebanyak 3 kali, sedangkan pada penelitian penulis membahas dari sudut pandang Filipina terkait PT PAL Indonesia yang menerima repetitif ekspor kapal perang.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Zenita Nuringtyas Ambarwati berjudul "Analisis Kepentingan Nasional Indonesia dalam Kerja sama '*Engineering and Manufacturing Development Phase of Joint Development* KF-X/IF-X' dengan Korea Selatan Tahun 2014". Penelitian ini membahas terkait konsep kepentingan nasional milik K.J. Holsti. Penulis melihat bahwa kepentingan nasional Indonesia lebih dominan pada kepentingan *middle range objectives*,

[14] Muhammad Darley Alfian Pratama, "Pengaruh kerja sama Indonesia-Bangladesh di bidang pengkeretaapian terhadap pembentukan *Indonesia Bangladesh Preferential Trade Agreement* (IB-PTA) tahun 2018" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

di mana kerja sama program pengembangan pesawat KF-X/IF-X dengan pemerintah Korea Selatan merupakan program nasional yang dilaksanakan untuk mewujudkan kemampuan bangsa Indonesia dalam penguasaan teknologi pesawat tempur. Diharapkan ke depannya pemerintah RI mempunyai kemandirian dalam membangun alutsista khususnya pesawat tempur. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai setelah program EMD *Phase* ini selesai, PTDI sebagai industri strategis nasional memiliki kemampuan untuk memproduksi, mengoperasikan, memelihara dan meng-*upgrade* pesawat tempur IF-X.[15]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu kedua penelitian ini membahas tentang hubungan diplomatis kerja sama bilateral di bidang alutsista. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, penelitian ini membahas terkait sudut pandang Indonesia dalam hal kepentingan transfer teknologi alutsista dari Korea Selatan, sedangkan pada penelitian penulis membahas dari sudut pandang Filipina terkait PT PAL Indonesia yang menerima repetitive ekspor kapal perang.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Miftha Loro Maisitha berjudul "Kerja sama Pertahanan Indonesia dengan Filipina dalam Memberantas *Piracy and Armed Robbery Ship* Periode 2012-2015". Penelitian ini membahas terkait kerja sama pertahanan Indonesia dengan Filipina dalam memberantas *Piracy and Armed Robbery Againts Ship* yang sering kali dihadapkan dengan berbagai

[15] Zenita Nuringtyas Ambarwati, "Analisis Kepentingan Nasional Indonesia dalam Kerja sama '*Engineering and Manufacturing Development Phase of Joint Development* KF-VIF-X' dengan Korea Selatan Tahun 2014", (Skripsi—Universitas Brawijaya, Malang, 2018).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

permasalahan kejahatan seperti penyanderaan dan pembajakan kapal. Angka tindak kejahatan di perairan Sulu masih tergolong tinggi walapun Indonesia dan Filipina telah melaksanakan patroli, inteligen dan pelatihan bersama.[16]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu kedua penelitian ini membahas terkait hubungan diplomatis wilayah maritim yang dilakukan oleh Filipina dan Indonesia untuk kepentingan nasional terutama di bidang maritim. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, penelitian ini membahas terkait hubungan diplomatis maritim dalam hal kerja sama dalam bidang pertahanan atau keamanan, sedangkan penulis membahas terkait hubungan diplomatis bilateral maritim antara Filipina dengan Indonesia dalam bidang impor kapal perang.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Akhmad Qelbi El Hakim berjudul "Kerja Sama Indonesia-Filipina dalam Mencegah dan Memberantas Kejahatan Transnasional di Indonesia dan Filipina Khususnya Perdagangan Narkoba/Obat-Obatan Terlarang Periode 2011-2016". Penelitian ini membahas terkait kerja sama bilateral antara Indonesia dan Filipina dalam melindungi negara dari kejahatan transnasional. Kejahatan merupakan suatu fenomena sosial yang sudah terjadi di mana saja dan kapan saja, serta dapat dilakukan oleh siapa saja. Munculnya kejahatan karena adanya celah atau kesempatan yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kejahatan transnasional khususnya perdagangan

[16] Miftha Loro Maisitha, "Kerja sama pertahanan Indonesia dengan Filipina dalam memberantas *Piracy and armed robbery ship periode 2012-2015*" (Skripsi—Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, 2018).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

narkoba atau obat-obatan ilegal sudah terjadi di Indonesia dan Filipina dalam kurun waktu cukup lama. Penggunaan narkoba yang berlebihan dan tanpa resep dokter dapat menyebabkan kelainan atau penyakit yang menyerang tubuh. Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan perdagangan narkoba, Indonesia dan Filipina menjalin kerja sama bilateral dengan membentuk program-program yang diharapkan dapat menurunkan tingkat kejahatan perdagangan narkoba di kedua negara.[17]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu kedua penelitian ini membahas terkait hubungan diplomatis untuk tujuan keamanan negara yang dilakukan oleh Filipina dan Indonesia. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, penelitian ini membahas terkait hubungan diplomatis keamanan nasional dalam hal upaya kerja sama pemerintah Indonesia-Filipina untuk menangani kasus kejahatan tansnasional berupa perdagangan narkoba/obat-obatan terlarang yang terdapat di wilayah Indonesia dan Filipina, sedangkan penulis membahas terkait hubungan diplomatis bilateral maritim antara Filipina dengan Indonesia dalam bidang impor kapal perang sebagai salah satu bentuk upaya keamanan negara.

Kelima, jurnal penelitian yang ditulis oleh Syafaat Rahman Musyaqqat berjudul "Merajut Relasi Menggenggam Tradisi: Masyarakat Nusa Utara dalam Diplomasi Maritim Indonesia-Filipina (1955−1974)". Penelitian ini membahas tentang diplomasi maritim antara Indonesia dan Filipina mulai

[17] Akhmad Qelbi El Hakim, "Kerja Sama Indonesia-Filipina dalam Mencegah dan Memberantas Kejahatan Transnasional di Indonesia dan Filipina Khususnya Perdagangan Narkoba/Obat-Obatan Terlarang Periode 2011-2016", (Skripsi—Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, 2018).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

terbangun ketika kedua negara baru saja memperoleh kemerdekaannya dan dihadapkan pada persoalan aktivitas lintas batas (border-cross) masyarakat Nusa Utara. Di satu sisi, mobilitas masyarakat Nusa Utara ke Pulau Balut dan Sarangani (Filipina) merupakan hal yang lumrah bahkan telah menjadi tradisi mereka. Di lain sisi, mobilitas penduduk merupakan tindakan yang sewaktu-waktu dapat menggiring relasi yang menegangkan secara politik bagi kedua negara. Artikel ini bertujuan menelusuri diplomasi maritim antara Indonesia dan Filipina sejak tahun 1955 hingga 1974. Dengan menggunakan metode sejarah, temuan studi menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan dalam relasi Indonesia-Filipina untuk saling memahami tradisi bahari masyarakat Sangihe-Talaud sebagai masyarakat perbatasan. Kecenderungan tersebut nampak pada beberapa kebijakan yang disepakati oleh kedua negara, salah satu diantaranya ialah Border Crosss Agreement pada 1956.[18]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu kedua penelitian ini membahas terkait hubungan diplomatis wilayah maritim yang dilakukan oleh Filipina dan Indonesia untuk kepentingan nasional terutama di bidang maritim. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, penelitian ini membahas terkait hubungan diplomatis dalam segi tradisi untuk meningkatkan hubungan bilateral maritim antara Filipina dan Indonesia, sedangkan penulis membahas terkait hubungan diplomatis bilateral maritim antara Filipina dengan Indonesia dalam bidang impor kapal perang.

[18] Syafaat Rahman Musyaqqat, "Merajut Relasi Menggenggam Tradisi: Masyarakat Nusa Utara Dalam Diplomasi Maritim Indonesia–Filipina (1955−1974)" *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* 13.2 (2019): 127-141.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Keenam, jurnal penelitian yang ditulis oleh Exellano Ramadhan Uno berjudul "Upaya Kerja sama Pemerintah Indonesia-Filipina dalam Memberantas Kegiatan *IUU Fishing* di Perbatasan Kedua Negara Khususnya Laut Sulawesi 2014-2016". Penelitian ini membahas terkait upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Filipina dalam menangani kasus *IUU Fihsing* yang terjadi di Laut Sulawesi. Upaya tersebut dilakukan berdasarkan kerja sama antara kedua negara. Terdapat berbagai macam hal atau alasan yang membuat suatu negara berada dalam kondisi Interdependensi dengan negara lain, contohnya dalam hal ini permasalahan ekonomi kelautan. Dalam memberantas *IUU Fishing* di perbatasan Indonesia-Filipina yaitu Laut Sulawesi. Berdasarkan penelitian tersebut, upaya-upaya yang dilakukan dalam memberantas kegiatan *IUU Fishing*, di antaranya adalah melakukan perjanjian MoU yang bertujuan untuk memberantas kegiatan *IUU Fishing*, serta membuat implementasi berupa *Plan of Action* berisikan langkah-langkah konkret atas tujuan yang ingin dicapai yaitu membahas mengenai pemberantasan *IUU Fishing*. Kerja sama bilateral yang di lakukan Indonesia-Filipina dalam penanganan *IUU Fishing* sebagaimana dijelaskan sebelumnya terbukti efektif. Efektifitas dan efisiensi yang menghasilkan keberhasilan dalam upaya tersebut tidak hanya dikarenakan oleh kekuatan dari perjanjian tersebut, tetapi juga karena adanya aktor-aktor lain yang berperan dalam menjalankan *Plan of Action* yang telah dibuat.[19]

[19] Exellano Ramadhan Uno, "Upaya Kerja sama Pemerintah Indonesia-Filipina dalam Memberantas Kegiatan *IUU Fishing* di Perbatasan Kedua Negara Khususnya Laut Sulawesi 2014-2016", *Journal of International Relations*, 3 (4), (2014).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu kedua penelitian ini membahas terkait hubungan diplomatis wilayah maritim yang dilakukan oleh Filipina dan Indonesia untuk kepentingan nasional terutama di bidang maritim. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, penelitian ini membahas terkait hubungan diplomatis maritim dalam hal upaya kerja sama pemerintah Indonesia-Filipina untuk menangani kasus *IUU Fishing* yang terjadi di perbatasan kedua negara yaitu Laut Sulawesi pada tahun 2014-2016, sedangkan penulis membahas terkait hubungan diplomatis bilateral maritim antara Filipina dengan Indonesia dalam bidang impor kapal perang.

Ketujuh, jurnal penelitian yang ditulis oleh M. Herry Misya berjudul "Efektivitas *Joint Press Statement* dalam Menanggulangi Ancaman Abu Sayyaf di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina". Penelitian ini membahas terkait kerja sama bilateral antara Indonesia dan Filipina dalam bidang keamanan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi kawasan stabil dan aman. Dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa serangan terorisme merupakan ancaman yang sangat serius terhadap individu, masyarakat, negara, dan masyarakat internasional. Permasalahan keamanan terjadi di daerah Filipina Selatan, di mana di daerah tersebut terdapat gerakan *Moro National Liberation Front* (MNLF) yang berusaha memisahkan diri dari Filipina yaitu Abu Sayyaf *Group*. Abu Sayyaf *Group* merupakan sebuah kelompok militan yang beroperasi di wilayah Filipina Selatan dan mempromosikan pendirian sebagai suatu Negara Islam yang merdeka di Mindanao dan Kepulauan Sulu, Filipina Selatan. Abu Sayyaf *Group* terlibat dalam berbagai tindak kekerasan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

seperti pemboman, penculikan, pembunuhan, dan pemerasan. Terkait permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia dan Filipina mengadakan rapat pada tanggal 1-2 April 2016. Hasil dari pertemuan tersebut adalah bahwa pihak Filipina berkomitmen penuh atas upaya melakukan yang terbaik dalam pembebasan para sandera. Selama proses negosiasi, desakan demi desakan mengenai kekuatan militer terus bergema, bahkan pasukan TNI juga telah disiapkan di sekitar wilayah Kalimantan untuk menunggu perintah jika adanya pelaksanaan kekuatan militer. Hal ini juga terlihat pada bentuk latihan bersama yang dilakukan di wilayah Kalimantan.[20]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu kedua penelitian ini membahas terkait hubungan diplomatis untuk tujuan keamanan negara yang dilakukan oleh Filipina dan Indonesia. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, penelitian ini membahas terkait hubungan diplomatis keamanan nasional dalam hal upaya kerja sama pemerintah Indonesia-Filipina untuk menangani kasus terorisme yang beroperasi di wilayah Filipina Selatan, sedangkan penulis membahas terkait hubungan diplomatis bilateral maritim antara Filipina dengan Indonesia dalam bidang impor kapal perang sebagai salah satu bentuk upaya keamanan negara.

Kedelapan, jurnal penelitian yang ditulis oleh Pujo Widodo, et al. berjudul "Strategi Penjagaan Perbatasan Laut: Indonesia dan Filipina dalam Mencegah Ancaman Insurjensi di Sulawesi Utara". Penelitian ini membahas terkait strategi penjagaan perbatasan laut Indonesia-Filipina di Kepulauan

[20] M. Herry Misya, "Efektivitas *Joint Press*...

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Nusa Utara yang selama ini pelaksanaannya dalam pencegahan, penindakan dan pemulihan belum optimal karena kurang mengidentifikasi ancaman nyata, tidak nyata, dan *hybrid*. Penggunaan strategi yaitu pencegahan, penindakan dan pemulihan serta kerja sama mengatasi ancaman ini berupa kerja sama intelijen, diplomasi, dan operasi terhambat adanya keterbatasan personel, persenjataan, perlengkapan, alat komunikasi, bahan bakar minyak, dan anggaran dalam pembangunan kekuatan, kemampuan, dan gelar pasukan. Faktor ancaman insurjensi di Sulawesi Utara berupa ancaman nyata dari militer Filipina, ancaman tidak nyata dari insurjen Filipina dan Indonesia serta kegiatan ilegal masyarakat sapi pisang kedua negara, ancaman *hybrid* dari negara ketiga yang mendukung insurjensi. Strategi pencegahan melakukan tukar informasi, strategi penindakan hukum terhadap pelanggar kedaulatan dan kegiatan ilegal serta penenggelaman kapal/penembakan langsung. Strategi pemulihan melakukan penjagaan terhadap pembangunan nasional dan stabilitas keamanan wilayah. Kerja sama intelijen dengan meningkatkan peran forum kominda, kerja sama diplomasi meningkatkan diplomasi secara internasional dan nasional, kerja sama operasi dengan melakukan patroli keamanan bersama, pengiriman pendidikan, latihan dan personel yang bertugas di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).[21]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu kedua penelitian ini membahas terkait hubungan diplomatis wilayah maritim yang

[21] Pujo Widodo, et al., "Strategi Penjagaan Perbatasan Laut: Indonesia dan Filipina dalam Mencegah Ancaman Insurjensi di Sulawesi Utara", *Jurnal Prodi Perang Asimetris*, 4 (2), (2018).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

dilakukan oleh Filipina dan Indonesia untuk kepentingan nasional terutama di bidang keamanan wilayah maritim. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, penelitian ini membahas tentang hubungan diplomatis maritim dalam hal upaya kerja sama pemerintah Indonesia-Filipina terkait strategi untuk mencegah ancaman insurjensi di Sulawesi Utara, sedangkan penulis membahas terkait hubungan diplomatis bilateral maritim antara Filipina dengan Indonesia dalam bidang impor kapal perang.

Kesembilan, jurnal penelitian yang ditulis oleh Anisa Mawaddah berjudul "Kerja sama Industri dan Infrastruktur Maritim antara Indonesia-Denmark 2015-2020". Penelitian ini membahas terkait kerja sama antara Indonesia dan Denmark dalam bidang maritim, yaitu bermula dari penandatanganan MoU dengan menyepakati beberapa bidang kerja sama di bidang industri dan infrastruktur maritim. Berkaitan dengan kerja sama bidang infrastruktur, di Pelabuhan Bitung ingin membangun infrastruktur berupa *depo container* dan *cold storage*. Namun dalam pelaksanaannya terjadi kendala karena keraguan investor melihat tidak adanya muatan ikan sejak adanya kebijakan moratorium kapal asing oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Hal itu pula yang membuat jalur pelayaran ke Pelabuhan Tanjung Pelepas yang sejak 2014 telah dibuka oleh Maersk mengalami penurunan dalam pengangkutan volume ekspor terutama ekspor ikan dan membuat Maersk menutup jalur tersebut. Kemudian kerja sama dalam bidang industri dilakukan oleh *Odense Maritime Technology* yang merupakan perusahaan jasa desain kapal milik Denmark dan bekerja sama dengan PT PAL Indonesia yang

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

merupakan galangan kapal terbesar di Indonesia. Proyek kerja sama ini bekerja sama dengan Denmark dalam hal transfer teknologi dan dikerjakan sepenuhnya di galangan PT PAL untuk membuat dua Kapal Frigate namun kerja sama ini baru efektif tahun 2021 dan sampai saat ini masih dalam pengerjaan.[22]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu kedua penelitian ini membahas tentang hubungan diplomatis kerja sama bilateral di bidang maritim. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, penelitian ini membahas terkait hubungan diplomatis bilateral maritim antara Indonesia dan Denmark dalam bidang industri dan infrastruktur yaitu berkaitan dengan kepentingan transfer teknologi dari Denmark, sedangkan pada penelitian penulis membahas terkait hubungan diplomatis bilateral maritim antara Filipina dengan Indonesia dalam bidang impor kapal perang.

Kesepuluh, jurnal penelitian yang ditulis oleh Aji Muhammad Iqbal berjudul "Kerja sama Indonesia dengan Belanda dalam Pengembangan Proyek Pembuatan Kapal Frigate". Penelitian ini membahas terkait kerja sama antara Indonesia dengan Belanda dalam meningkatkan alutsista yaitu pengadaan Kapal Frigate. Pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan Belanda dalam melakukan pembangunan 2 kapal PKR kapal jenis Perusak Kawal Rudal (PKR) yaitu kapal Frigate melalui program pendidikan dan *Transfer of Technology* (ToT). Kerja sama ini terdiri dari berbagi informasi mengenai pembuatan *blue print* serta ilustrasi model Kapal Frigate yang kemudian

[22] Anisa Mawaddah, "Kerja sama Industri dan Infrastruktur Maritim antara Indonesia-Denmark 2015-2020", *Journal Hubungan Internasional*, 10 (1), (2022).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

pembangunannya disepakati dengan pembagian pembangunan berdasarkan modul, latihan, serta pendidikan dan pelatihan yang merupakan latihan bagi PT PAL untuk menunjang pembangunan Kapal Frigate. Didukung dengan pertukaran kunjungan yang kebanyakan dilakukan oleh Belanda untuk mengawasi pembangunan dan pemasangan setiap modul pada kapal Frigate. Dalam kerja sama pembangunan ini memiliki hambatan yang terpusat pada permasalahan SDM, penyediaan bahan baku dan permesinan, serta pemberian dana pembangunan kapal dari pemerintah Indonesia yang menyusahkan.[23]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu kedua penelitian ini membahas tentang hubungan diplomatis kerja sama bilateral di bidang alutsista. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, penelitian ini membahas terkait sudut pandang Indonesia dalam hal kepentingan transfer teknologi alutsista dari Belanda, sedangkan pada penelitian penulis membahas dari sudut pandang Filipina terkait PT PAL Indonesia yang menerima repetitif ekspor kapal perang.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

F. Argumentasi Utama

Penulis berargumentasi bahwa impor kapal perang jenis *Strategic Sealift Vessel* berpengaruh terhadap kerja sama militer Filipina-Indonesia.Melihat dari perjalanan kerja sama antara Filipina dan Indonesia sebelum adanya impor kapal perang jenis *Strategic Sealift Vessel* Kerja sama

[23] Aji Muhammad Iqbal, "Kerja sama Indonesia dengan Belanda dalam Pengembangan Proyek Pembuatan Kapal Frigate", *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 9 (1), (2021).

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

kedua negara tersebut hanya bermotif politik dan keamanan internasional diantaranya strategi diplomatik,melindungi dari ancaman domestik dan eksternal,pengaruh diplomatik dan keseimbangan kekuatan.Sedangkan pada saat Filipina sesudah impor kapal perang jenis *Strategic Sealift Vessel ,* Kerja sama kedua negara tersebut tidak hanya bermotif politik dan keamanan internasional,melainkan adanya motif ekonomi di dalamnya seperti transaksi ekonomi dan mempertahankan pekerjaan industri senjata domestik.

Berdasarkan pemikiran tersebut,peneliti menduga bahwa impor sebagai perdagangan internasional memberikan aspek pengaruh adanya perbedaan terhadap kerja sama militer sebelum dan sesudah impor kapal perang jenis *Strategic Sealift Vessel*.

G.Sistematika Pembahasan

Berikut dalam penelitian ini, penulis menjabarkan pembahasan menjadi lima poin penting. Pembahasan ini dibagi untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Bab pertama, dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, argumentasi utama, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini penulis membahas landasan konseptual. Landasan konseptual digunakan sebagai bahan analisis terhadap studi kasus atas pengaruh kebijakan impor kapal perang jenis *Strategic Sealift Vessel* terhadap perkembangan kerja sama militer FIlipina-Indonesia. Konsep tersebut

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

menjabarkan pengaruh kebijakan impor kapal perang jenis *Strategic Sealift Vessel* terhadap perkembangan kerja sama militer Filipina-Indonesia.

Bab ketiga, bab ini membahas tentang metode yang digunakan penulis dalam penelitian. Penulis menjelaskan tentang pendekatan, jenis, tahap, lokasi dan waktu penelitian, pengumpulan data, teknik analisis data, tahapan penelitian, serta teknik pengujian keabsahan data.

Bab keempat, pada bab ini penulis menjabarkan tentang inti pembahasan dari penelitian ini yang telah disusun selama penelitian. Penulis memaparkan pengaruh kebijakan impor kapal perang jenis *Strategic Sealift Vessel* terhadap perkembangan kerja sama militer Filipina-Indonesia.

Bab kelima, bab ini merangkum hasil penelitian yang mencakup kesimpulan dari pembahasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB II
KAJIAN KONSEPTUAL

A. Perdagangan Internasional

Transaksi perdagangan luar negeri atau ekspor-impor pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara-negara yang berbeda.

Impor adalah setiap barang yang dimasukkan dari luar negeri baik secara legal maupun ilegal. Kegiatan ekspor-impor telah dilakukan sejak zaman dahulu. Nenek moyang dan para pendahulu sudah melakukan kegiatan tersebut. Secara sederhana, pengertian impor adalah kegiatan memasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri.[1] Pihak yang melakukan kegiatan impor disebut importir.[2] Pada penelitian ini, Negara Filipina melakukan perdagangan internasional dengan Indonesia yaitu impor kapal perang dari PT PAL Indonesia, karena Indonesia telah berhasil memenangkan tender yang diadakan oleh Negara Filipina. Dalam hal ini, Filipina berkedudukan sebagai importir.

Namun dalam pertukaran barang dan jasa yang menyebrangi laut dan darat, tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks antara pengusaha-pengusaha yang mempunyai bahasa, kebudayaan, adat istiadat dan cara yang berbeda-beda. Pengaruh keseluruhan dari perdagangan ekspor-impor tanpa memandang penyebab-penyebabnya adalah untuk memberikan keuntungan

[1] I Komang Oko Berata, *Panduan Praktis Ekspor Impor*, (t.tp.: RAS, 2014), 63.
[2] Ibid., 65.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

bagi negara-negara yang mengimpor dan mengekspor. Transaksi ekspor-impor secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dari negara-negara yang terlibat di dalamnya.[3]

Salah satu teori yang digunakan dalam kajian perdagangan internasional yaitu teori keunggulan komparatif. Ricardo menyatakan bahwa sekalipun suatu negara mengalami kerugian atau ketidakunggulan absolut dalam memproduksi suatu komoditi jika dibandingkan dengan negara lain, namun perdagangan yang saling menguntungkan masih dapat berlangsung. Negara yang kurang efisien akan berspesialisasi dalam produksi ekspor pada komoditi yang memiliki kerugian absolut lebih kecil. Dari komoditi inilah negara tersebut mempunyai keunggulan komparatif (*comparative advantage*). Sedangkan dari pihak lain, negara tersebut mengimpor komoditi yang mempunyai kerugian absolut lebih besar. Dari komoditi inilah negara tersebut mengalami kerugian komparatif. Hal tersebut dikenal dengan hukum keunggulan komparatif.[4]

Teori perdagangan internasional mengkaji dasar-dasar terjadinya perdagangan internasional serta keuntungan yang diperoleh. Kemudian dalam kebijakan perdagangan internasional, membahas terkait alasan-alasan serta pengaruh pembahasan perdagangan, serta hal-hal yang menyangkut proteksionisme. Ide yang mendasar dari perdagangan internasional adalah untuk mengurangi distorsi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam

[3] Roselyne Hutabarat, *Transaksi Ekspor Impor* (Jakarta: Erlangga, 1997), 1.
[4] Dominick Salvatore, *Ekonomi Internasional*, Jilid 1, Terj. Haris Munandar, (Jakarta: Erlangga, 1997).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

kebijakan tarif dan non-tarif. Pengenaan tarif sebagai pajak menyebabkan biaya perdagangan meningkat. Kemudian akibat dari biaya perdagangan yang meningkat, maka harga-harga barang impor di negara-negara pengekspor akan meningkat, sedangkan harga terendah untuk barang-barang ekspor dan penurunannya volume perdagangan.[5]

B. *Strategic Sealift Vessel* (SSV)

Pada tahun 2017, Filipina mengimpor kapal perang kedua jenis *Strategic Sealift Vessel* (SSV) buatan PT PAL Indonesia. Kapal kedua *Strategic Sealift Vessel* (SSV) 123 meter bernama BRP Davao Del Sur-602 yang akan diserahkan kepada Departemen Pertahanan Nasional (DND) Filipina meninggalkan tempat kelahirannya PT PAL Indonesia di Dermaga Ujung Surabaya untuk berlayar selama lima hari mengarungi Laut Jawa, kemudian menyusuri Selat Makassar, memasuki Laut Sulawesi dan Laut Sulu sebelum berlabuh di pangkalannya kelak di Manila, Filipina. Sebelumnya, di tahun 2016 PT PAL Indonesia telah melakukan *delivery* kapal serupa yang diberi nama BRP Tarlac-601 oleh DND Filipina. BRP Davao Del Sur-602 di-delivery kepada DND Filipina untuk dioperasikan oleh Angkatan Laut Filipina dalam seremoni yang dilaksanakan pada 31 Mei 2017.[6]

Kapal SSV memiliki spesifikasi panjang 123 meter, lebar 21,8 meter, bobot 7200 ton dan kecepatan maksimal 16 knot. Kapal SSV mampu

[5] Ibid.
[6] Departemen Humas PT PAL Indonesia (Persero), "SSV Penakluk Samudera Karya PT PAL (Persero)", https://www.pal.co.id/2020/08/publikasi/artikel/ssv-penakluk-samudera-karya-pt-pal-indonesia-persero/, diakses pada 8 September 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

mengangkut maksimal 621 personel dan 12 unit kendaraan militer, serta mengakomodasi 3 helikopter. Masing-masing dilengkapi dengan dua unit wahana pendarat (LCU) 23 meter untuk menerjunkan pasukan pendarat tempur di wilayah pantai musuh dan 2 unit Rigid Hull Inflatable Boats (RHIB) untuk melaksanakan misi strategis anti terorisme laut dan inspeksi. Jangkauan operasi kapal tersebut minimal 7.500 mil laut. Saat ini, kedua SSV yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Filipina merupakan kapal *support* terbesar dan tercanggih yang dimiliki oleh negara tersebut.[7]

C. Kerja sama Internasional

Suatu negara tidak dapat berfungsi tanpa hubungan dengan negara lain. Suatu negara sangat membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan negara lain. Bentuk kerja sama tersebut dapat berupa kerja sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, pertahanan dan keamanan. Setiap negara memiliki tujuan yang berbeda-beda, salah satunya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi mengarah pada pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fakta ini menunjukkan perlunya kerja sama dengan negara lain.

Kerja sama di dunia Internasional ialah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Hubungan Internasional. Hal ini dikarenakan kerja sama internasional ialah wujud nyata dari adanya hubungan internasional yang

[7] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

berlandaskan pada tujuan, visi, dan juga misi yang ingin dicapai oleh satu negara dengan beberapa negara lainnya. Tujuan yang paling utama adanya kerja sama internasional ialah untuk mewujudkan kepentingan nasional atau *national interest* sesuai dengan kebijakan luar negeri. Dalam konteks visi dan misi tergantung pada negara yang menjalin kerja sama internasional. Kerja sama internasional dilakukan karena adanya ketergantungan dari satu negara terhadap negara lain yang telah menjalin suatu kerja sama.

Kerja sama internasional didefinisikan sebagai sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dalam kerja sama internasional yakni sejauh mana keuntungan antara dua negara yang diperoleh melalui kerja sama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerja sama internasional dapat dijalin dikarenakan dalam lingkup internasional terdapat berbagai bidang, seperti bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Dari sini maka timbullah berbagai masalah sosial, sehingga dibutuhkan kerja sama untuk mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi oleh negara yang melakukan kerja sama secara internasional.[8]

Di bawah ini ialah beberapa bentuk kerja sama internasional berdasarkan pada jumlah yang mengikuti suatu kerja sama:[9]

[8] Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 34.
[9] Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi Antara Teori dan Praktik* (Yogyakarta: PT. Graha Ilmu, 2008), 85-87.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

a. Kerja sama bilateral

Kerja sama bilateral merupakan kerja sama yang dilakukan antar dua negara. Kerja sama ini biasanya dalam wujud diplomatik, perdagangan, pendidikan kebudayaan dan berbagai bidang lainnya. Kerja sama bilateral cenderung lebih mengutamakan pendekatan secara soft atau secara kekerabatan, dalam hal ini membrikan bantuan dana untuk fasilitas kegiatan ataupun berupa pinjaman.

b. Kerja sama regional

Kerja sama ini dilakukan oleh beberapa negara di dalam suatu regional atau kawasan. Dalam kerja sama ini biasanya dilakukan dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan seperti Asean, Liga Arab, Uni Eropa dan kawasan lainnya

c. Kerja sama multilateral

Kerja sama ini dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu bidang tertentu, diantaranya bidang ekonomi dalam APEC (Asia Pacific Economy Corporation), bidang sosial dalam ILO (International Labour Organization, Bidang pertahanan dan keamanan dalam NATO (North Atlantik Treaty Organization)

Kerja sama Internasional merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat internasional saat ini yang saling bergantung satu dengan yang lain. Kerja sama merupakan rangkaian hubungan yang tidak didasari oleh kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum. Kerja sama menurut Holsti, yaitu proses-proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak.

Beberapa faktor yang menjadi fokus perhatian di dalam suatu kerja sama internasional adalah Negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi, dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil[10].

D. Kerja Sama dalam Bidang Militer

Peran industri militer di era globalisasi sekarang ini dianggap sangat vital dalam aspek kehidupan suatu negara. saat ini hampir semua negara di dunia saling menunjukan eksistensinya di dunia industri kemiliteran dengan mengembangkan industri kemiliterannya agar menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain. Dalam dunia kerja sama internasional saat ini telah banyak banyak wujud kerja sama yang telah dilakukan dalam bidang industri militer. Baik itu kerja sama pembelian alutsista maupun kerja sama untuk memodernisasi alutsista

Pembangunan dan potensi pertahanan dan keamanan merupakan salah satu pilar terdepan demi mengamankan kepentingan dan tujuan nasional.

[10] [10] Muhadi Sugiono, *Global Government Sebagai Agenda Penelitian dalam Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2004), 6

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Urusan bidang pertahanan dan keamanan negara yang diatur dalam UUD dan merupakan salah satu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ketentuan tersebut secara jelas menggariskan bahwa segala aspek yang menyangkut sistem pertahanan dan keamanan negara.

Setiap negara memiliki alasan tertentu dalam hal peningakatan kapabilitas pertahanannya. Kemajuan teknologi di bidang non militer yang berdampak pada bidang militer sampai pada menjaga kepentingan nasional baik di dalam maupun di luar territorial merupakan alasan mengapa suatu negara meningkatkan kapabilitas pertahanannya. Walaupun tidak ada dorongan maupun keuntungan dari suatu negara memperbaiki kapabilitas pertahanannya, tatap saja modernisasi tetap terjadi. Ini disebabkan oleh sistem internasional yang anarkis dan tidak bisa diprediksi. Serta kekhawatiran negara lain memiliki keunggulan teknologi militer yang akan mengancam kita sendiri.

Dalam industri pertahanan fungsi utama negara yaitu sebagai instrumen dalam membangun industri pertahanan di dalam negeri. Dalam hal ini khususnya paada negara-negara berkembang dan industri yang baru. contohnya produksi persenjataan akan didominasi oleh negara secara utuh maupun sebagaian juga termasuk dalam kepemilikan oleh negara.

Dasar penilaian kemampuan suatu industri pertahanan terlihat dari segi tingkat kesiapan manufaktur dan teknologi . hal ini mendefinisikan kemampuan industri pertahanan dalam melakukan perubahan dan inovasi produk serta penerapan uji coba dan tes komponen, sub sistem, prototype dan sistem yang utuh untuk mengetahui fungsi esensial produk tersebut. Tingkat

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

kesiapan ini menentukan tingkat kesiapan kerja sama suatu industri. Peningkatan tingkat kesiapan manufaktur dan teknologi dapat diperoleh melalui pembelian lisensi, *joint production*, modernisasi peralatan produksi, *joint section*, *joint development*, serta penambahan fasilitas penelitian seperti laboratorium dan pusat perancangan.

Kekuatan militer merupakan salah satu faktor yang membuat suatu negara disegani oleh negara lain. Dalam rangka untuk mempertahankan, membangun, dan mengembangkan kehidupan politik suatu negara dari berbagai bentuk atau potensi ancaman, diperlukan adanya kekuatan negara. Pembangunan kekuatan pertahanan merupakan salah satu fondasi untuk menjaga eksistensi negara tersebut. Sehingga, efektifitas kekuatan militer menjadi sebuah persoalan yang penting. Kekuatan militer suatu negara dapat diukur dari kekuatan fisik (alutsista) yang dimiliki oleh negara tersebut.[11] Maka, suatu ketika ditemukan adanya indikasi kekurangan dalam komponen kekuatan militer suatu negara, diperlukan beberapa atensi dari pihak pemerintahan berupa kebijakan-kebijakan, salah satunya dapat berbentuk hubungan kerja sama di bidang militer dengan negara-negara yang dianggap dapat memenuhi kekurangan negara tersebut.

Kerja sama merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pihak (orang, lembaga, pemerintah, atau lainnya) untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Joshua, kerja sama atau aliansi merupakan koalisi dari

[11] Meilia Widad Angela, "Implementasi Strategi *Rebalance Toward* Asia-Pacific Amerika Serikat Terhadap Filipina pada Tahun 2011-2016", (Skripsi—Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016), 42.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

beberapa negara yang mengkoordinir tindakan mereka untuk memenuhi beberapa tujuan akhir. Kerja sama militer adalah suatu bentuk kerja sama yang mungkin terjadi apabila terdapat dua kekuatan yang satu dengan lainnya memiliki kesamaan dalam masalah keamanan.

Kerja sama militer merupakan bentuk asosiasi mengikat yang dapat disesuaikan dengan kepentingan-kepeningan suatu negara dalam menghadapi persoalan tertentu sehingga dimungkinkan apabila dalam kerja sama ini akan melemah jika negara bersangkutan dihadapkan dengan permasalahan baru.[12] Menurut Craig Synder, kerja sama atau aliansi militer dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu: *collective security* dan *collective defense*. *Collective security* adalah bentuk perjanjian yang tidak memasukkan suatu perjanjian yang ketika satu negara akan diserang oleh negara lain, maka negara lainnya akan ikut melakukan pembelaan. Sedangkan, *collective defense* merupakan bentuk kerja sama militer yang memasukkan perjanjian untuk menghadapi musuh.[13]

Kebutuhan negara akan senjata untuk membangun *national security* dan *national power* tidak hanya dapat di penuhi oleh industri senjata lokal di masing-masing negara.Kerja sama dengan pihak luar negeri diperlukan untuk menambah kapasitas amunisi persenjataan dalam negeri suatu negara.

K.J. Holsti memberikan arti kerjasama adalah merundingkan atau membahas masalah,mengemukakan bukti untuk menyetujui satu penyelesaian dan mengakhiri dengan perjanjian yang memuaskan kedua belah pihak.Holsti

[12] Andi Siti Chadijah Fitriahningsih, "Kerja sama Militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan *Armed Forces of The Philippines* (AFP) di Daerah Perbatasan Miangas-Indonesia dan Davao-Filipina", (Skripsi—Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015), 1.
[13] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

menjelaskan bahwa istilah kerja sama dapat menimbulkan suatu citra untuk menyelesaikan masalah sehingga pihak negara lain bisa membantu untuk meningkatkan produktifitasnya.[14]

Kebutuhan senjata pada suatu negara menjadi sangat penting,mengingat negara harus melindungi wilayah,penduduk,dan berbagai sumber daya yang ada dalam negara tersebut.Oleh karena itu,kerja sama di bidang pertahanan yang di khususkan kepada jual beli senjata amat dibutuhkan oleh negara yang belum bisa menciptakan senjata untuk bersaing dengan negara lain.

Kerja sama militer mempunyai motif ekonomi,politik,dan keamanan internasional.Dalam buku Holsti yang berjudul *International Politics, a frame work for analysis* mengungkapkan

"From the point of view of international politics on military cooperation,however,there are interest factors available.These include economic transaction , maintaining employment in the domestic arms industry, strategic diplomatic,protect against domestic and external threats,diplomatic influence and balance of power[15]*."*

"Dari sudut pandang politik internasional tentang kerja sama militer, bagaimanapun juga, ada faktor-faktor kepentingan yang tersedia. Termasuk transaksi ekonomi, mempertahankan pekerjaan industri senjata dalam

[14] K.J.Holsti , Politik internasional,kerangka untuk analisis,Erlangga,Jakarta,1998,hal.209
[15] Ibid.,Hal.356

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

domestik, strategi diplomatik, melindungi negara dari ancaman domestik dan eksternal, pengaruh diplomatik dan keseimbangan kekuatan".

1. Transaksi Ekonomi

Kegiatan yang dilakukan oleh negara yang melahirkan perubahan kondisi keuangan dalam alokasi persenjataan militer, baik itu berkurang (membeli) ataupun bertambah (menjual). Transaksi ekonomi membahas akibat saling ketergantungan antarnegara dunia, dari segi perdagangan internasional yang menyangkut masalah jual beli secara internasional (ekspor dan impor). [16]

2. Mempertahankan pekerjaan industri senjata dalam domestik

Kegiatan produksi persenjataan dalam negeri untuk diperjualbelikan kepada negara lain demi terciptanya keuntungan dari hasil produksi persenjataan tersebut.Industri domestik merupakan Industri nasional (pemerintah maupun swasta) yang produknya baik secara sendiri maupun kelompok, termasuk jasa pemeliharaaan dan perbaikan, atas penilaian pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara.[17]

3. Strategi Diplomatik

Diplomasi secara praktis dan teoritis merupakan aktivitas politik yang dimainkan oleh suatu negara dalam rangka mencapai kepentingan nasional. manajemen hubungan antarnegara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor

[16] Ibid.,357
[17] Ibid.,357

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobi, kunjungan-kunjungan, serta aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait. Strategi diplomasi merupakan rencana yang dilakukan oleh suatu negara untuk bernegoisasi dengan negara lain demi terciptanya kepentingan nasional,[18]

4. Melindungi negara dari ancaman domestik dan eksternal

Suatu negara membuat aspek pertahanan dan merespon ancaman berupa militer dan kejahatan tradisional seperti kelompok bersenjata,teroris,narkoba, dan kejahatan kriminal maupun berupa ekonomi seperti keuangan perekonomian yang memburuk demi terciptanya kawasan yang kondusif dan sejahtera.Ancaman eksternal merupakan ancaman dari luar negeri yang bisa membahayakan kondisi dalam negeri seperti halnya sengketa wilayah,perampokan sumber daya alam maupun serangan senjata dari luar negeri.[19]

5. Pengaruh Diplomatik

Pengaruh Diplomatik menentukan kepentingan nasional, mengatur strategi, dan membuat kebijakan atau mengevaluasi kebijakan yang sudah dilaksanakan. Seseorang yang melakukan pengaruh atas diplomatik bisa berupa presiden, raja maupun menteri. Seseorang yang melakukan pengaruh

[18] Ibid.,358
[19] Ibid.,358

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

diplomatik sangat penting demi terciptanya hubungan kerja sama bilateral kedua negara.[20]

6. Keseimbangan Kekuatan (*Balance of Power*)

Keseimbangan Kekuatan adalah sebuah teori dalam hubungan internasional yang menyatakan bahwa setiap negara atau sebuah kelompok negara melindungi negaranya dengan cara mengimbangi kekuatan negara yang menjadi rivalnya. Negara dapat menciptakan perimbangan kekuasaan dengan beberapa cara diantaranya kerjasama antarnegara, peningkatan armada militer atau perluasan wilayahnya. Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap perimbangan kekuatan sebelum perang dunia dan paska perang dunia. Paska perang dunia perimbangan kekuatan terjadi karena setiap negara merasakan ketakutan akan adanya dampak kerusakan yang fatal akibat senjata modern, sehingga setiap negara cenderung menahan diri. Maka dari itu daripada sebuah konfrontasi terbuka secara langsung, setiap negara cenderung meningkatkan kemampuan militernya dan yang kedua melalui pendekatan politik atau negara-negara superpower melakukan intervensi militer skala kecil kepada negara-negara dunia ketiga[21].

[20] Ibid.,359
[21] Ibid.,360

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Taylor dan Bogdan penelitian kualitatif merupakan sebuah tahap penelitian yang dapat mengumpulkan data dalam bentuk kalimat yang tertulis atau tidak tertulis (lisan) dari berbagai sumber serta kejadian sosial di sekitar manusia.[22] Adapun pendapat lain menurut Sukmadinata menyatakan bahwa penelitian kualitatif digunakan sebagai metode yang mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena, peristiwa, kegiatan sosial, sikap seseorang, kepercayaan yang dianut, dan sudut pandang seseorang baik individu maupun kelompok.[23]

Sementara itu, sifat penelitian ini adalah deskriptif. Sifat deskriptif pada penelitian kualitatif yaitu peneliti berusaha untuk membuat gambaran secara sistematis dan akurat. Jadi sifat penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan secara rinci mengenai realitas dari berbagai fenomena yang

[22] Lexy J. Moleong, *Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), 71.
[23] Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan Cetakan Kelima* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 63.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

terjadi dan objek penelitian di sini disajikan secara rinci sehingga dapat diketahui ciri, karakter, dan modelnya secara komprehensif. Melalui pendekatan kualitatif dan sifat penelitian deskriptif, penelitian ini hendak mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan impor kapal perang jenis *Strategic Sealift Vessel* terhadap perkembangan kerja sama militer Filipina-Indonesia. Penulis mencari informasi bagaimana perkembangan kerja sama militer ini bisa dipengaruhi oleh kebijakan impor yang telah dilakukan oleh Filipina terhadap Indonesia. Peneliti memakai penelitian jenis kualitatif deskriptif karena peneliti hendak memaparkan dan menjelaskan secara sistematis dan akurat mengenai proses impor kapal perang jenis *Strategic Sealift Vessel* (SSV) dan kerja sama Filipina – Indonesia pada tahun 2014,2016, dan 2021. Untuk mengetahui karakteristik fenomena yang terjadi terhadap ke 3 periode tersebut , maka sangat tepat sekali untuk menggunakan metode penelitian jenis kualitatif deskriptif.

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, kualitas riset sangat tergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang dihasilkan. Pertanyaan yang selalu diperhatikan dalam pengumpulan data adalah apa, siapa, dimana, kapan, dan bagaimana. Penelitian kualitatif bertumpu pada triangulation data yang dihasilkan dari tiga metode: *interview*, *participan to observation*, dan telaah catatan organisasi (*document records*).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data lazimnya menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Juga tidak diabaikan kemungkinan menggunakan sumber-sumber non-manusia (*non-human source of information*), seperti dokumen, dan rekaman (*record*) yang tersedia. Pelaksanaan pengumpulan data ini juga melibatkan berbagai aktivitas pendukung lainnya, seperti menciptakan *rapport*, pemilihan informan, pencatatan data/informasi hasil pengumpulan data. Karena itu dalam bagian ini akan dibahas secara berturut-turut; Penciptaan *rapport*, Pemilihan informan, Pengumpulan data dengan metode observasi, dokumentasi, wawancara, Pengumpulan data dari sumber non-manusia dan Pencatatan data/ informasi hasil pengumpulan data.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai data dengan menggunakan teknik dokumentasi dan penggalian data berbasis studi literatur dari berbagai media, terlebih internet yang menyediakan akses berbagai data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.

Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

penelitian. Dalam penelitian kualitatif taknik pengumpulan data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum, baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut.

Dokumentasi adalah satu proses untuk mendapatkan kejelasan sebagai tujuan penelitian yang bersumber dari data yang berbentuk arsip (dokumen), karena suatu dokumen merupakan sumber data yang berbentuk tulisan, foto, maupun dokumen yang berbentuk elektronik. Adapun dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini melalui sumber resmi yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan.

Jadi disini , peneliti mengumpulkan data-data sekunder berbasis studi literatur dari berbagai media dan menggunakan teknik dokumentasi tentang apa saja yang dibutuhkan dan berkaitan dengan topik pembahasan penelitian mengenai impor kapal perang jenis *Strategic Sealift Vessel* dan kerja sama militer pada tahun 2014,2016, dan 2021.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

C. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar supaya bisa menentukan tema dan tempat untuk merumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[24] Menurut Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman proses analisis penelitian diawali

[24] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 280.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

dengan mempelajari, membaca, menganalisis data dengan menggunakan langkah-langkah seperti berikut ini:[25]

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif (sebagaimana telah dibahas pada materi sebelumnya). Sebab, kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak credible, sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Pengumpulan data yaitu menyimpulkan data melakukan penelitian, dokumentasi dengan memastikan strategi pengumpulan data yang dianggap cocok dan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data seterusnya. Data-data terkait kerja sama militer yang dicari dengan menggunakan teori K.J.Holsti ditelusuri dan dikumpulkan untuk menjawab pembahasan dalam penelitian.

2. Reduksi Data

[25] Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru/Matthew B Miles dan A. Michael Huberman*, Terj. Tjejep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1920), 15.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Di dalam reduksi data, penulis akan menunjukkan, menghilangkan yang tidak dibutuhkan dan menggolongkan data dengan sistematis sehingga penulis bisa menyederhanakan data yang diperoleh saat penelitian. Data-data terkait kerja sama militer yang dicari dengan menggunakan teori K.J.Holsti.masing-masing data setiap komponen teori tersebut direduksi , dibuang yang tidak perlu , diambil sesuai yang dibutuhkan , digolongkan data-datanya sesuai pembahasan sehingga peneliti semakin mudah untuk menyederhanakan data-datanya ke dalam penelitian.

3. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Penyajian data merupakan aktivitas mengumpulkan data yang telah di olah sedemikian rupa. Pengumpulan data dilakukan dengan memakai pola, diagram, bagan dan juga hubungan antar kategori agar isi dari penelitian ini lebih mudah dipahami.[26] Data-data terkait kerja sama militer yang dicari dengan menggunakan teori K.J.Holsti Masing-masing data setiap komponen dari teori tersebut disajikan sesuai yang dibutuhkan dan dicari hubungannya agar isi pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah untuk dipahami.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir

[26] Imron Rosidi, *Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 26.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Penarikan kesimpulan adalah aktivitas analisis yang lebih dikhususkan pada interpretasi data yang telah disediakan. Pada penelitian kualitatif cenderung menjawab bagaimana rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya pada penelitian ini, namun juga tidak menutup kemungkinan apabila akan ada masalah di tahap selanjutnya. Kesimpulan yang terdapat dalam penelitian kualitatif cenderung menjawab bagaimana rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal penelitian, namun masalah pun dapat terlihat nanti, sedangkan dalam penelitian kualitatif cenderung bersifat sementara dan akan dikembangkan setelah memperoleh hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan. Data-data terkait kerja sama militer yang dicari dengan menggunakan teori K.J.Holsti Masing-masing data setiap komponen dari teori tersebut disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

D. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Dalam menentukan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan terlebih dahulu. Pelaksanaan teknis pemeriksaan data berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Di sini penulis menggunakan uji kredibilitas, yaitu uji keyakinan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Uji kredibilitas mempunyai dua fungsi, yaitu untuk menjalankan pemeriksaan agar tahap kepercayaan

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

terhadap penemuan penulis dapat tercapai, dan menujukkan tahap kepercayaan penemuan penulis dengan bukti-bukti yang dikaji.[27]

Pada penelitian ini, untuk menguji kredibilitas penulis memakai triangulasi. Triangulasi ialah metode pemeriksaan keabsahan data yang terdiri dari berbagai macam metode pengumpulan data serta sumber informasi yang terkait, dalam metode ini dapat menggunakan sesuatu yang lain diluar informasi penelitian, yang memiliki tujuan sebagai keperluan pengecekan ataupun sebagai pembanding pada data riset yang diperoleh.[28] Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Metode triangulasi yang digunakan pada penelitian ini ialah triangulasi sumber. Sugiono berpendapat triangulasi sumber adalah membandingkan serta meneliti kembali tingkat kepercayaan suatu data yang didapat melalui waktu

[27] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia, 2012).
[28] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: CV Alfabeta, 2015), 372.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

serta alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.[29] Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran. Data-data terkait kerja sama militer yang dicari dengan menggunakan teori K.J.Holsti..Masing-masing data setiap komponen dari teori tersebut di uji kredibilitasnya sesuai dengan sumber-sumber yang diambil terhadap fenomena yang terjadi pada 2014,2016, dan 2021 agar dapat dibandingkan dan dihasilkan data-data kredibilitas sehingga dapat dijelaskan bagaimana pengaruh impor kapal perang jenis *Strategic Sealift Vessel* terhadap kerja sama militer Filipina-Indonesia.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[29] Ibid, 373.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB IV
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Di dalam bab 4 ini, peneliti memakai teori K.J.Holsti yang terdiri dari transaksi ekonomi,mempertahankan pekerjaan industri senjata domestik,strategi diplomatik,melindungi dari ancaman domestik dan eksternal,pengaruh diplomatik dan keseimbangan kekuatan untuk menjelaskan adanya kerja sama militer yang dipengaruhi oleh impor kapal perang jenis *Strategic Sealift Vessel* pada tahun 2014,2016,dan 2021. Peneliti memakai tiga periode tahun tersebut karena peneliti ingin mengetahui perbedaan kerja sama sebelum impor kapal perang jenis *Strategic Sealift Vessel* dan sesudah impor kapal perang.Peneliti juga ingin mengetahui alasan Filipina impor kapal perang jenis *Strategic Sealift Vessel* dari 2014 yang bermula dari tender, lalu menyepakati kerja sama *MOU* pada 2016, kemudian berlanjut pada kerjasama *JDSCC* pada tahun 2021. Dari masing-masing tahun tersebut, mempunyai 6 sub-bab yang meliputi teori K.J.Holsti tentang bagaimana proses kerja sama militer Filipina-Indonesia atas kapal perang jenis *Strategic Sealift Vessel*.

A. Kerja Sama Filipina – Indonesia Sebelum Adanya Impor Kapal Perang Jenis *Strategic Sealift Vessel*

Pada tahun 1993, Indonesia dan Filipina menandatangani MoU *Joint Comission* yang menghasilkan berbagai kesepakatan di bidang pertahanan. Kemudian pada tahun 1997, kedua negara sepakat untuk menandatangani

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

kontrak kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan melalui pendidikan, latihan bersama, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kerjasama logistik dan operasi, komunikasi, teknologi, sistem pendukung logistik, termasuk layanan dan pemeliharaan. Perjanjian tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi UU Nomor 20 Tahun 2007. Di bidang perbatasan, kerjasama kedua negara telah dilakukan secara efektif melalui beberapa kegiatan, di antaranya: patroli perbatasan, komunikasi, pengaturan lalu lintas perbatasan, dan intelijen dalam *Joint Border Committee* (JBC). Kedua negara telah melakukan kerjasama dalam mengelola ancaman keamanan negara di perbatasan, termasuk penanganan terorisme.[1] Selanjutnya pada tahun 1975, Indonesia dan Filipina menandatangani dua kesepakatan yaitu *Border Patrol Agreement* (BPA) dan *Border Crossing Agreement* (BCA) melalui pertemuan komite perbatasan Republik Indonesia dan Republik Filipina di Manila.[2] .

Menurut teori K.J.Holsti,bahwa kerja sama militer ada yang bermotif ekonomi dan ada pula yang bermotif untuk politik dan keamanan internasional.Dari fakta tersebut,Indonesia dan Filipina bekerja sama dalam hal politik dan keamanan internasional yang meliputi melindungi ancaman dari domestik dan eksternal,keseimbangan kekuatan,strategi diplomatik,pengaruh diplomatik dan *Balance of Powe*r.Kerja sama tersebut hanya meliputi seputar

[1] Kementerian Pertahanan RI, "*Indonesian Defence White Paper*", dalam https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/05/2015-INDONESIA-DEFENCE-WHITE-PAPER-ENGLISH-VERSION.pdf, diakses pada 5 Januari 2023.
[2] Endra Kusuma dan Syaiful Anwar, "*Implementation of the Philippines-Indonesia Coordinated Patrol Sea Border Area of Indonesia and the Philippines from the Sea Power Perspective*", *Journal of Social and Political Science*, 3 (4), 1121.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

patroli perbatasan, komunikasi, pengaturan lalu lintas perbatasan, latihan bersama, pengembangan sumber daya manusia dan intelijen.Namun tidak memasukkan motif ekonomi dan pembelian senjata di dalamnya.

B. Tender Kapal Perang Jenis *Strategic Sealift Vessel* Oleh Filipina Tahun 2014

Pada 2014, sistem pertahanan dan keamanan Kementerian Pertahanan Filipina mengadakan Tender Internasional Pengadaan Kapal Perang yang bernilai kontrak sebesar USD 90 juta. Kemudian , Filipina memilih negara Indonesia untuk membuat kapal perang jenis *Strategic Sealift Vessel* . Untuk mengetahui proses impor kapal perang jenis *Strategic Sealift Vessel* melalui tender dan kerja sama Filipina-Indonesia pada 2014 ini , maka akan dicari menggunakan teori K.J.Holsti

1. Pengaruh Diplomatik

Sebagai negara Republik Presidensial, kepala negara dan pemerintahan Filipina dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat untuk mengemban jabatan selama 6 tahun. Selain itu, Presiden Filipina juga merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Sejak 30 Juni 2010 hingga 30 Juni 2016, Filipina dipimpin oleh Presiden Benigno Aquino III dan Wakil Presiden Jejomay Cabaiatam Binay. Benigno Simeon Cojuangco Aquino III memandang politik sebagai kendaraan yang

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

diperlukan untuk perubahan. Perspektif yang dia bentuk tersebut melalui ajaran dan contoh yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Dikutip dari beberapa sumber, ditemukan fakta bahwa Presiden Benigno Aquino III merupakan seorang presiden yang berkarisma. Diungkapkan oleh Holmes bahwa kepemimpinan Aquino telah mengembalikan kestabilan dan prospek reformasi institusi dan politik Filipina ke arah perubahan yang lebih baik.[3]

Banyak kerja sama atau perjanjian yang berhasil diwujudkan pada masa pemerintahan Presiden Benigno Aquino III, baik dengan tujuan perdamaian, kesejahteraan rakyat, atau lain sebagainya. Presiden Benigno Aquino III dikenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang tinggi, terbuka serta bijak dalam menggunakan peluang yang ada dan berupaya membawa pengaruh dalam kalangan dewan perwakilan dan senator, selain dibekali dengan karisma serta kemampuan diplomasinya.[4] Dari gaya kepemimpinannya tersebut Benigno Aquino III menjalani hubungan yang cukup intens dan positif terhadap Amerika Serikat, Hal itu dibuktikan dengan aliansi kedua negara yang menitikberatkan pada peningkatan kapabilitas AFP dalam melawan terorisme di Filipina. Juga pada pemerintahannya dan arah aliansi keamanan Filipina di masa pemerintahannya juga menaruh perhatian kepada permasalahan teritori yakni agresifitas Tiongkok pada Klaim Laut

[3] Norizan Kadir, "*The Philippines-Moro Islamic Liberation Front (MILF) Peace Agreement and The Commitment of President Benigno Aquino III*", *International Journal of Interdisciplinary & Strategic Studies*, Vol. 1. No. 1, (2020), 15.
[4] Ibid., 13-14.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Tiongkok Selatan. Sejak Aquino memerintah, ia mengupayakan dialog dengan pihak Amerika Serikat dalam meningkatkan Aliansi keamanan kedua negara.

Pada masa pemerintahan Aquino III, ia juga menggelar latihan gabungan militer Balikatan di tahun 2014 serta PHIBLEX yang merupakan pelatihan mendarat amphibi untuk pasukan AFP. Kemudian Aquino III juga memperkuat aliansi keamanan negaranya dengan kunjungan Presiden Obama di bulan April untuk menandatangani perjanjian Encanced Defense Cooperation Agreement yang memberikan akses lebih lanjut kepada pasukan militer Amerika Serikat serta perlengakapan mereka untuk mengakses pangkalan militer Filipina untuk tujuan keamanan bersama.

Berkat Aquino III Amerika meningkatkan *foreign millitary financing* kepada Filipina dari 11,9 juta dollar menjadi 30 juta dollar pada tahun 2012. Juga Amerika menyumbangkan dua kapal penjaga pantai kelas Hamilton yang dinamakan BRP Ramon Alcaraz dan Gregorio del Pilar pada angkatan laut Filipina.

Berdasarkan fakta tersebut terkait pengaruh diplomatik dengan menggunakan teori K.J.Holsti,Filipina yang dipimpin oleh Presiden Benigno Aquino III ini terbuka untuk Amerika dan tertutup bagi China, yang tidak mau bersentuhan sama sekali hingga membawa permasalahan Laut China Selatan ke arbitrase internasional.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

2. Melindungi Negara dari Ancaman Domestik dan Eksternal

Secara astronomis, Filipina terletak di antara 4° 40’ LU – 21° 10’ LU dan 116° 40’ BT – 126° 34’ BT. Secara geografis, Filipina berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu: sebelah Barat Filipina adalah Laut Cina Selatan, sebelah Timur dan Utara adalah Samudra Pasifik, sedangkan di sebelah Selatan adalah Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Filipina merupakan negara kepulauan yang memiliki total luas wilayah ± 300.000 km^2, dengan luas darat 298.170 km^2 dan luas perairan 1.830 km^2. Negara Filipina merupakan negara kepulauan terbesar kelima di dunia dan juga negara yang memiliki garis pantai terpanjang kelima di dunia. Filipina memiliki garis pantai sepanjang 36.289 km. Filipina tidak memiliki perbatasan darat, sehingga akses keluar masuk Filipina didominasi oleh jalur maritim. Oleh karena itu, Filipina memiliki tantangan yaitu wilayah perbatasan yang sering kali digunakan sebagai pintu masuk teroris dan penyelundupan senjata.[5]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Filipina berbentuk negara kesatuan, yaitu negara merdeka dan berdaulat dengan yang berkuasa hanya satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah sebagai bagian dari negara. Negara kesatuan sering juga disebut sebagai negara unitaris atau *unity*. Unitaris merupakan negara tunggal (satu negara) yang monosentris (berpusat satu), terdiri

[5] BBC News, “*Philippines Country Profile*”, http://www.bbc.co.uk/news/worldasia-15521300, diakses pada 26 September 2022.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi, baik ke luar maupun ke dalam dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi.[6]

Bentuk pemerintahan Filipina adalah republik demokratis, kedaulatan berada di tangan rakyat dan kewenangan pemerintah berasal dari rakyat, sebagaimana yang diatur dalam konstitusi 1987. Presiden dipilih melalui pemilu untuk masa jabatan enam tahun serta wakil presiden yang juga dipilih langsung dapat mengabdi dengan masa waktu tidak lebih dari dua periode enam tahun berturut-turut. Presiden dan wakil presiden dipilih melalui pemungutan suara yang terpisah dan mungkin berasal dari partai politik yang berbeda. Filipina sebagai negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial memiliki presiden sebagai kepala negara sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan. Namun dalam sistem pemerintahan Filipina, presiden mempunyai posisi yang cukup lemah karena dalam konstitusi Filipina, *impeachment* dapat dibahas di senat jika sebelumnya disetujui oleh sepertiga anggota parlemen. Maka terdapat kemungkinan bahwa presiden bisa diberhentikan oleh parlemen. *Impeachment* yang dibolehkan di Filipina dengan alasan politik, bukan kejahatan.[7]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[6] Credit Agricole Group, "*Philippines (The)*", https://international.groupecreditagricole.com/en/international-support/philippines/economic-overview, diakses pada 26 September 2022.
[7] Ibid.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Filipina telah memulai program modernisasi untuk meningkatkan kemampuan mempertahankan perbatasan maritimnya dalam waktu 15 tahun dengan anggaran sebesar USD 2 miliar.[8] Lebih spesifiknya, telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada Mei 2013, Presiden Benigno Aquino III telah mengumumkan program modernisasi militer sebesar USD 1,9 miliar di luar anggaran pertahanan normal, yang sebagian besar digunakan untuk membayar biaya personel. Selain itu, anggaran tersebut juga disediakan untuk pembelian peralatan baru yang akan membantu melindungi domain maritim negara kepulauan Filipina. Konfrontasi antara Filipina dan Tiongkok terus meningkat sejak Juni 2012 ketika Tiongkok merebut wilayah yang dikenal dengan *Scarborough Shoal* yang diyakini kaya akan minyak dan gas bumi serta sumber daya perikanan. Tiongkok mengklaim sekitar 90 persen dari seluruh Laut Cina Selatan termasuk wilayah yang berada dalam kedaulatan Filipina, Brunei, Malaysia, Vietnam dan Taiwan. Tiongkok telah melakukan reklamasi lahan di berbagai bagian dari pulau-pulau *Spratly* dan tampaknya sedang membangun lapangan terbang dan pelabuhan di 5 titik kontrol *Spratly*.[9]

Filipina, yang merupakan sekutu dekat AS, telah membawa kasus arbitrase internasional terhadap Tiongkok, mencari klarifikasi mengenai hak mereka di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. Dikutip dari

[8] Ike Agestu, "Indonesia Ikut Tender Alutsista Filipina", https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141217172403-106-18867/indonesia-ikut-tender-alutsista-militer-filipina, diakses pada 3 Oktober 2022.
[9] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Reuters, kepala sistem senjata Angkatan Laut Filipina ketika diwawancarai, menyatakan bahwa:

> "Peristiwa di barat Laut Filipina memunculkan beberapa urgensi akuisisi." Kata Laksamana Caesar Taccad.[10]

3. Keseimbangan Kekuatan (*Balance of Power*)

Sejak 2010, Filipina telah menikmati peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup memuaskan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 6,3% per-tahunnya. Pada tahun 2013, perekonomian Filipina bertumbuh sebesar 7,2% sehingga menjadikan Filipina sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat kedua setelah Tiongkok. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh ekspansi investasi dan manufaktur serta meningkatnya konsumsi dan jasa yang membantu mengimbangi dampak dari serangkaian bencana alam yang terjadi di Filipina sepanjang tahun tersebut. Kemudian pada tahun 2015, PDB Filipina meningkat sebesar 6%. Begitu pula di tahun-tahun berikutnya, pendapatan negara Filipina semakin meningkat dari berbagai sumber pemasukan, seperti: ekspor minyak, bursa efek, perdagangan luar negeri (produk elektronik, manufaktur, mesin dan alat transportasi, kerajinan kayu dan *furniture*, produk mineral, komoditas bahan kimia, onderdil kendaraan, produk tekstil, komponen logam, minyak kelapa), dan lain sebagainya. Bagi negara berkembang seperti Filipina, hal tersebut

[10] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

menjadi penting sebagai batu loncatan dalam membantu memperlancar pembangunan negara serta stabilisasi ekonomi.[11]

Sejak Presiden Benigno Aquino III berkuasa pada tahun 2010, pemerintah berencana untuk menghabiskan USD 13 miliar pada proyek infrastruktur di tahun 2015 dan sebanyak USD 18 miliar dianggarkan untuk tahun 2016. Hal ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun-tahun periode sebelumnya, yang mana pemerintah hanya menganggarkan USD 3 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Namun demikian, jumlah investasi tidak bisa mengimbangi permintaan negara. Manila dan beberapa kota besar lain menderita kemacetan lalu lintas utama karena pertumbuhan ekonomi, penduduk, dan jumlah kendaraan tidak sesuai dengan investasi di bidang infrastruktur. Menurut Nombeo yang membandingkan data lalu lintas 88 negara di dunia, kota-kota di Filipina pada tahun 2015 berada pada peringkat ke-4 terburuk di antara negara-negara Asia dalam efisiensi lalu lintas, ketidakpuasaan komuter, dan emisi karbon dioksida. Efek dari kemacetan tersebut adalah terganggunya pengiriman barang melalui pelabuhan Manila, sehingga menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar USD 1,6 miliar.[12]

Berdasarkan laporan Global Firepower 2016, kapasitas militer Negara Filipina masih berada di peringkat ke-51 dari 126 negara. Penilaian ini berdasarkan 50 faktor yang menentukan potensi konvensional

[11] Meilia Widad Angela, "Implementasi Strategi *Rebalance Toward* Asia-Pacific Amerika Serikat Terhadap Filipina pada Tahun 2011-2016", (Skripsi—Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016), 37-38.
[12] Ibid., 41-42.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

kemampuan perang setiap negara baik di darat, laut, maupun udara. Namun ada beberapa elemen yang tidak diperhitungkan, salah satunya adalah kemampuan nuklir. Hal tersebut dikarenakan nuklir tidak dianggap sebagai persenjataan konvensional. Berdasarkan data GFP 2015, kekuatan militer Filipina didukung oleh beberapa faktor, di antaranya: faktor kekuatan manusia (*manpower*), sumber daya minyak, angkatan kerja, serta besar anggaran militer suatu negara.[13]

Menurut GFP, porsi populasi suatu negara sebenarnya dapat membantu dalam upaya perang. Total populasi Filipina adalah 100.998.376 jiwa. Sebanyak 41.575.000 jiwa cocok untuk pelayanan militer. Per-tahunnya terdapat 2.100.000 jiwa yang mencapai usia militer. Personel militer aktif garis depan Filipina adalah 220.000 jiwa, serta personel aktif cadangan sebanyak 430.000 jiwa. Untuk kekuatan militer di darat, Filipina memiliki tank sebanyak 45 unit, kendaraan perang berlapis baja (AFVs) 778 unit, dan meriam derek 270 unit. Kekuatan udara Filipina memiliki total *aircraft* sebanyak 135 unit, *Fixed-Wing Attack Aircraft* 8 unit, *Transport Aircraft* 95 unit, *Trainer Aircraft* 23 unit, dan helikopter 82 unit. Total kekuatan angkatan laut Filipina, yang mencakup berbagai alat pendukung, adalah sebanyak 120 armada, kapal pengawal 3 unit, korvet 11 unit, dan kapal pertahanan pesisir 38 unit.[14]

[13] Ibid., 42-44.
[14] Ibid., 42-43.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

GFP juga mengkalkulasi kekuatan suatu negara berdasarkan banyaknya sumber daya minyak yang dimiliki. Meskipun kemajuan teknologi dibuat dalam medan perang, minyak tetap merupakan salah satu faktor terpenting dari setiap kekuatan tempur. Produksi minyak Filipina adalah sebanyak 12.000 bbl/hari, sedangkan konsumsinya jauh lebih besar, yaitu 218.000 bbl/hari. Cadangan minyak yang dimiliki Filipina sebanyak 138.500.000 bbl/hari. Kemudian menurut GFP, angkatan kerja mencerminkan kemungkinan kekuatan industri perang. Filipina memiliki 41.330.000 jiwa angkatan kerja, 446 *merchant marine strength*, 6 buah pelabuhan dan terminal utama, 213.151 cakupan jalan, 995 cakupan rel kereta api, dan 247 bandara. Faktor lain yang diperhitungkan oleh GFP dalam menentukan kekuatan militer suatu negara adalah besarnya anggaran militer yang disediakan negara tersebut untuk berbagai keperluan pertahanan. Pada tahun 2015, anggaran militer Filipina ditingkatkan sebesar 25% dari tahun sebelumnya.[15]

Pada tahun 2011, Presiden Benigno Aquino III mengumumkan rencana untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk peningkatan militer dengan membentuk *AFP Moderniztion Act Trust Fund*, dan kembali menegaskannya dengan merevisi program tersebut pada tahun 2012. Presiden Benigno Aquino III memulai program tersebut ditujukan untuk meningkatkan persenjataan negara dengan menambah pesawat modern dan kapal angkatan laut, terlebih di tengah ketegangan

[15] Ibid., 43-44.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

yang meningkat dengan Tiongkok terkait sengketa maritim di Laut Tiongkok Selatan. Pada Mei 2013, Presiden Benigno Aquino III mengumumkan program modernisasi militer sebesar USD 1,9 miliar diluar anggaran pertahanan normal, yang sebagian besar digunakan untuk membayar biaya personel. Uang tersebut juga disediakan untuk pembelian peralatan baru yang akan membantu melindungi domain maritim negara kepulauan Filipina. AFP mengalokasikan USD 364,8 juta untuk membeli pesawat patroli maritim dan helikopter baru yang mampu bertahan dari serangan kapal selam.[16]

Berdasarkan kondisi perekonomian negara Filipina yang sedang mengalami pertumbuhan pesat, dengan pemasukan yang berasal dari perdagangan internasional baik produk-produk hasil bumi atau sumber daya alam maupun yang dihasilkan dari sumber daya manusia, terlebih melihat kondisi militer Filipina yang terbilang masih lemah, menjadi salah satu alasan pemerintah Filipina mengeluarkan kebijakan untuk memperkuat kondisi militer demi pertahanan negara, yang salah satunya dilakukan dengan pengadaan modernisasi alutsista. Menurut konteks ini yaitu impor kapal perang jenis *Strategic Sealift Vessel* (SSV) dari PT PAL Indonesia.

4. Strategi Diplomatik

Dalam tahun 2014, dipimpin oleh presiden Benigno Aquino III mempunyai tiga komponen penting dalam pertimbangan suatu kebijakan

[16] Ibid., 44-45.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

luar negeri itu diambil. Pertama adalah keamanan nasional yang berfokus pada geopolitik dunia sesudah berlangsungnya perang dingin[17]. Kedua adalah peningkatan diplomasi ekonomi itu sangat penting dan diperlukan untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Ketiga adalah proteksi hak-hak dan kesejahteraan warga negara Filipina yang ada diluar negeri[18]. Dengan tiga komponen pentingnya tersebut, Presiden Benigno Aquino III mampu menjadikan Filipina sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan tertinggi ASEAN (*Asociation of Southeast Asia Nation*) dengan angka 7,5 %. Menurut Presiden Benigno Aquino III adalah "*Good governance is a good economy* "disaat pertemuan Summit APEC CEO di Bali [19].

Dibalik Filipina menjadi negara yang maju secara ekonominya ditangan Presiden Benigno Aquino III, namun muncul permasalah lain yaitu relasi antara Filipina Tiongkok. Presiden Benigno Aquino III tidak mau berhubungan sama sekali kecuali dalam forum multilateral organisasi regional ASEAN. Hal ini terungkap pada pertemuan *Asean Plus One, Asean Plus Three* dan *Asean Regional Forum*[20]. Awal buruknya hubungan dengan Tiongkok adalah sengketa atas klaim di wilayah Laut Cina Selatan. Presiden Aquino III merasa keberatan hingga membawa pada jalur Mahkamah Arbitrase di Den Haag,Belanda. Di lain sisi Tiongkok

[17] *Secretary Albert del Rosario, Philippine Foreign Today, Stratbase Research Institute, 2011, 2*
[18] *Rosario, Philippine Foreign Policy Today,2*
[19] Didik Purwanto, "Ini Kunci Sukses Filipina Jadi Terbaik Se-Asia," Kompas.com, 6 Oktober 2013. http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/10/06/1510112/Ini.Kunci.Sukses.Filipina.Jadi.Terbaik.Se-Asia
[20] *Julio S. Amador III, Louie Dane Merced and Joycee Teodoro, The Philippine's Foreign Policy and Relation Towards Major Power, 2015, Asia Centre dan DGRIS, 5*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

menolak keputusan Mahkamah Arbitrase hingga mengajak negara-negara lain untuk menolaknya dan Tiongkok mengklaim ada 60 negara yang menyetujuinya. Namun pada faktanya,hanya beberapa saja yang mendukung atas penolakan Tiongkok terhadap Mahkamah Arbitrase Internasional[21] .Hal ini membuat relasi dengan Tiongkok semakin buruk dan Presiden Benigno Aquino III ingin memperkuat pertahanan militernya demi kedaulatan negaranya sehingga Presiden Benigno Aquino III memiliki *national interest* untuk memperkuat pertahanan nasionalnya karena disebabkan adanya *security dilemma* atas penolakan Tiongkok terhadap keputusan Mahkamah Arbitrase. Situasi ini bertahan sampai akhir pertengahan 2016 pada kepemimpinan Presiden Benigno Aquino III.

5. Transaksi Ekonomi

Filipina diindikasikan mulai gencar memenuhi kebutuhan militernya, termasuk salah satunya pemenuhan kebutuhan alutsista dengan mengadakan beberapa tender. Daftar pengadaan alutsista yang diumumkan pada Rabu, 17 Desember 2014 tersebut akan dibeli dengan dana dari anggaran tersebut. Filipina akan membeli dua fregat, dua helikopter dan tiga kapal perang untuk ditempatkan di Laut Cina Selatan yang menjadi sengketa dengan Tiongkok. Indonesia dan Italia mengajukan tender untuk dua helikopter anti-kapal selam, sementara Korea Selatan,

[21] Pascal S Bin Sanju, "Ini Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional Atas Laut Cina Selatan," National Geographic News Indonesia, 13 Juli 2016 http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/07/ini-putusanmahkamah-arbitrase-internasional-atas-laut-cina-selatan diakses 8 November 2022 pukul 06:40

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Spanyol dan Perancis telah mengajukan penawaran untuk dua pesawat siluman dan fregat. Indonesia telah memenangkan kontrak untuk dua kapal angkut militer dan akan memberikan kapal pertama pada awal 2016. Taiwan dan lima galangan kapal lainnya bersaing untuk tiga kapal penyerang multifungsi yang dilengkapi rudal. Sementara itu, Amerika Serikat akan memasok radar pesisir.[22]

6. Mempertahankan Pekerjaan Industri Senjata Domestik

Kapal perang tipe SSV dibanderol senilai U$ 45 juta per unit. Kapal perang ini merupakan pengembangan dari kapal perang tipe Landing Platform Dock (LPD-125). Kapal tersebut merupakan kapal yang awalnya dikembangkan bersama Korea Selatan. Namun tenaga ahli PAL melakukan modifikasi sehingga lahirlah kapal tipe SSV. Konten lokal sekitar 35% permesinan masih dari luar. Direktur Utama PT PAL menyatakan bahwa dahulu Indonesia belajar dari Korea ketika TNI AL melakukan pemesanan kapal ke Korea Selatan sebanyak 4 unit, 2 unit dibangun di Korsel dan 2 unit dibangun di PAL. Kemudian terdapat *transfer of technology* untuk memenuhi kebutuhan PAL. Berdasarkan transfer teknologi, PAL membuat kembali yang sejenis, dan dijual ke Filipina.[23]

[22] Ibid.
[23] Republik Merdeka, "PT PAL Jual 2 Unit Kapal Perang SSV ke Filipina", https://ekbis.rmol.id/read/2014/05/21/156086/pt-pal-jual-2-unit-kapal-perang-ssv-ke-filipina, diakses pada 16 Agustus 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

C. Kerja Sama Filipina-Indonesia MoU dalam Bidang Logistik dan Industri Pertahanan

Hubungan kerja sama antara Indonesia dan Filipina bermula pada tahun 2016 dalam sektor keamanan dan industri pertahanan. Indonesia dan Filipina menandatangani kerjasama *MOU*. Filipina melakukan kegiatan impor kapal perang dengan jenis *Strategic Sealift Vessel* yang di buat oleh Indonesia pertama kali pada 8 Mei 2016.Untuk mengetahui proses terciptanya kerjasama *MOU* pada tahun 2016 ini , maka akan dicari menggunakan teori K.J.Holsti.

1. Pengaruh Diplomatik

Berakhirnya periode kepemimpinan Presiden Benigno Aquino III pada 30 Juni 2016, kepemimpinan Negara Filipina dilanjutkan oleh Presiden Duterte berdasarkan Pemilihan Presiden Filipina tahun 2016. Dalam pemilihan tersebut, Presiden Duterte memenangkan suara dengan selisih yang cukup besar. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa Presiden Duterte memiliki legitimasi yang kuat sebagai Presiden Filipina selama 1 periode ke depan. Melihat dari survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen menunjukkan kepuasan rakyat Filipina terhadap kepemimpinan Presiden Duterte.[24] Rodrigo Rody Roa Duterte atau dijuluki Digong, merupakan seorang politikus dan pengacara Filipina

[24] Putri Anisa Febriani, "Politik Luar Negeri Filipina Terhadap Amerika Serikat di Era Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte Tahun 2016-2018", (Skripsi—Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2019), 99.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

keturunan Visayan. Rodrigo Duterte merupakan seorang pemimpin yang dikenal kontroversial sejak menjabat sebagai Walikota Davao karena kebijakan-kebijakannya yang terkenal tegas dan berani membunuh para pelaku kejahatan di Filipina.[25]

Pada masa kampanye, Presiden Duterte membuat strategi kampanye yang memfokuskan pada pembangunan ekonomi dengan memberantas korupsi dan meningkatkan kesejahteraan pegawai, serta yang paling terkenal yaitu kebijakan Presiden Duterte yang dibuat dalam bidang keamanan yang sangat tegas. Selama menjadi seorang walikota, Presiden Duterte berhasil menjadikan Kota Davao menjadi kota pertama bebas asap rokok di Filipina. Dengan menjadikan kota Davao sebagai kota bebas asap rokok, Presiden Duterte menunjukkan kepeduliannya kepada rakyat terhadap kesehatan dan ingin membuat rakyatnya selalu aman dari bahaya asap rokok. Di Kota Davao, Presiden Duterte telah menjabat selama 7 kali masa jabatan, dengan total lebih dari 22 tahun. Sehingga, dunia politik bukanlah hal yang baru bagi Duterte.[26]

Selama karir politiknya, Presiden Duterte merupakan seorang pemimpin yang dikenal kontroversial karena pada waktu menjabat sebagai Walikota Davao, dia berhasil menjadikan Kota Davao yang terkenal dengan tingkat kriminalitas tinggi serta perang antar-kelompok menjadi salah satu kota paling aman di Filipina. Perubahan di Kota Davao tersebut,

[25] Nevreda Arbian Ristantya, "Terpilihnya Rodrigo Duterte sebagai Presiden Filipina pada Pemilu Tahun 2016", (Skripsi—Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Yogyakarta, 2018), 1.
[26] Ibid., 1-2.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

membuat Presiden Duterte dikenal sebagai sosok yang kontroversial karena caranya dalam memberantas kejahatan di kota tersebut dikenal menakutkan. Presiden Duterte memimpin sendiri pasukan untuk memberantas kejahatan (dikenal sebagai *Davao Death Squad*) yang bertugas mengeksekusi para kriminal kelas bawah seperti pencuri, pemerkosa, atau bandar narkoba.[27]

Aktivis dan investigator dari Komisi HAM memperkirakan lebih dari 1.000 orang tewas oleh eksekusi di luar hukum antara tahun 1998 hingga 2008. Selain masalah pemberantasan kejahatan, Presiden Duterte juga dikenal kontroversial terkait ucapannya. Beberapa kali Presiden Duterte dikritik terhadap ucapan kasarnya. Dia pernah melakukan penghinaan terhadap Paus, serta pernah dikecam akibat lelucon tentang perkosaan dan pembunuhan seorang misionaris perempuan asal Australia di penjara Davao pada tahun 1989.[28]

Presiden Duterte mendeklarasikan "*Independent Foreign Policy*" pada awal kepemimpinannya sebagai Presiden Filipina. Kemandirian yang ditanamkan dalam diri seorang Presiden Duterte ini juga menjadi salah satu dasar pemikiran dalam mengambil kebijakan. Keinginan untuk tidak meneruskan kebijakan Presiden Aquino yang melibatkan lembaga atau badan Hukum dalam permasalahan Filipina, menjadi salah satu alasan Presiden Duterte mengambil tindakan untuk mengesampingkan hasil

[27] Ibid., 3.
[28] Ibid., 3-4.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

keputusan arbitrase internasional. Hal ini, dilakukan dikarenakan Presiden Duterte tidak tertarik atau tidak mau untuk melibatkan lembaga atau badan hukum seperti pengadilan arbitrase internasional dan ASEAN yang dapat berperan mediasi dalam masalah Laut Tiongkok Selatan pada masa itu.

Pada masa Presiden Duterte Filipina mengambil peluang untuk memperbaiki hubungan bilateral kepada Tiongkok. Dengan memiliki hubungan yang baik antar kedua negara Presiden Duterte berpikir akan mendatangkan keuntungan bagi Filipina dan negara-negara lain tidak dapat menghentikan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Hal ini yang membuat Presiden Duterte memilih untuk menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok Selatan melalui kerja sama dengan Tiongkok.

Pada masa kepemimpian Presiden Duterte, pertimbangan dalam membuat keputusan *national interest* dalam problematika di wilayah Laut Cina Selatan,itu sangat berbeda dengan periode sebelumnya yang dipegang oleh Presiden Benigno Aquino III. Dalam kurun waktu sekitar 5 bulan setelah resmi menjabat sebagai presiden, Duterte mengubah arah *national security* nya dari periode sebelumya Presiden Benigno Aquino III, yang berawal dari menjauh terhadap ancaman (*threat*) dan tidak mau bersentuhan sama sekali dengan Tiongkok menjadi ke arah mendekati ancaman (*threat*) . Hal ini ditandai dengan adanya pertemuan dengan presiden Xi-Jinping yang menghasilkan 13 point penting kerjama bilateral Filipina – Tiongkok dalam bidang ekonomi, perdagangan, pariwisata, budaya, anti-narkotika, kelautan serta penandatangan nota kesepahaman

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

(MoU) kedua negara untuk menjaga pantai bersama di wilayah sengketa[29]. Hal ini membuat perubahan dalam kondisi geopolitik global terutama di wilayah Asia. Hal ini membuat kawasan Asia Tenggara Semakin kesulitan untuk membuat Tiongkok mundur dalam problematika di wilayah Laut Cina Selatan, bahkan Amerika Serikat yang merupakan salah satu negara yang membantu dalam permasalahan Laut China Selatan pada masa kepemimpinan Presiden Benigno Aquino III akan berpikir lebih lanjut dalam membuat langkah-langkah selanjutnya[30].

Dalam menjaga *national interest* yang bertujuan untuk menjaga *national security*, maka diperlukan adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin negara dengan melihat kondisi dan stabilitas negara. Presiden Duterte yang terkenal dengan kebijakan - kebijakannya yang kontroversial sehingga menjadi perhatian dunia, Presiden Duterte memutuskan untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik dan damai dengan Tiongkok. Hal ini dapat dilihat ketika kunjungan Presiden Rodrigo Duterte pada 23 Januari 2017 di Tiongkok yang mendapatkan peresmian dan penandatangan kerjasama sebesar US$3.7 miliar (Rp 49,4 triliun) [31] . Presiden Rodrigo Duterte semakin akrab dengan Tiongkok, bukan hanya dalam bidang ekonomi, bahkan dalam

[29] Tim VOA Indonesia, "Presiden Filipina Duterte Nyatakan 'Perpisahan' dari AS."
[30] Richard Javad Heydarian, What Duterte Portends for Philippine Foreign Policy, S. Rajaratnam School of International Studies, 2016,
[31] Hanna Azarya Samosir,"China-Filipina Sepakati 30 Proyek Kerja Sama Senilai Rp49,4 T," CNN Indonesia, Senin, 23 Januari 2017, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170123155033-113-188304/china-filipina-sepakati30-proyek-kerja-sama-senilai-rp494-t/ diakses pada 8November 2022 pukul 11.55 WIB.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

bidang pertahanan. Dibuktikan dengan adanya kesepakatan untuk membuat badan khusus dalam menangani maritim yang meliputi pariwisata, pertanian, perdagangan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan[32] . Dengan kondisi tersebut, semakin hilang pengaruh Amerika Serikat terhadap Filipina terutama dalam hal wilayah sengketa Laut China Selatan. Namun banyaknya kerjasama yang dilakukan oleh Filipina terhadap Tiongkok justru akan membuat Filipina dirugikan berdasarkan fakta bahwa Tiongkok berinvestasi kepada Filipina sebesar US$15 miliar untuk membangun infrastruktur, perjanjian perdagangan yang juga besar di angka US$ 13,5 miliar, serta kerjasama di bidang militer yaitu jalur transportasi di daerah sengketa serta keamanannya[33]. Semua hal ini bisa membuat Filipina sangat bergantung kepada Tiongkok. apalagi Amerika Serikat yang selama ini dapat membentengi pengaruh Tiongkok ke Filipina. Namun sudah diputus oleh Presiden Rodrigo Duterte, sehingga tidak ada lagi benteng yang bisa membentengi Filipina jika kerjasama kedua negara ini tidak berjalan dengan sesuai rencana.

Menurut Presiden Duterte negara yang mandiri adalah negara yang dapat mengeluarkan kebijakannya sendiri tanpa adanya pengaruh dari luar yang dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara. Kemudian, Presiden

[32] Samosir, ”China-Filipina Sepakati 30 Proyek Kerja Sama Senilai Rp49,4 T

[33] Arif Wicaksono, “Delegasi Tiongkok Bicarakan Investasi USD 15 Miliar dengan Filipina,” Metro News, Minggu, 22 Januari 2017, http://ekonomi.metrotvnews.com/globals/akWwJAdk-delegasi-tiongkok-bicarakan-investasi-usd-15- miliar-dengan-filipina diakses pada 8 November 2022 pukul 12:16 WIB.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Duterte juga merasa kurangnya minatnya terhadap pemain luar seperti Amerika Serikat.

Melihat pada sisi pembuat keputusan pada masa kepemimpinan Presiden Duterte, adanya kebijakan baru yang dibuat oleh Presiden Duterte. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Duterte membuat hubungan antara Filipina dengan Amerika Serikat semakin merenggang diakibatkan perubahan arah politik luar negeri Filipina tersebut. Pada masa pemerintahan Presiden Duterte didominasi oleh rasa nasionalisme dan identitas yang didasari pada sentimen imperialisme Amerika Serikat terhadap Filipina. Hal tersebut mendorong terjadinya kerenggangan hubungan antara kedua negara pada periode pemerintahan Presiden Duterte.

2. Melindungi Negara dari Ancaman Domestik dan Eksternal

Peningkatan aktifitas militer Tiongkok di wilayah Laut Tiongkok Selatan ini memaksa Filipina untuk melakukan peningkatan keamanan wilayah negaranya. Hal ini dapat dibuktikan dari penandatanganan perjanjian dengan Amerika Serikat *Enhanced Defense Cooperation Agreement*, dengan tujuan menambah kekuatan pertahanan Filipina di wilayah konflik Laut Tiongkok Selatan. Hal ini juga menunjukkan bahwa hubungan Filipina dan Tiongkok tidak dapat dipisahkan dari campur tangan Amerika Serikat, dan dapat diketahui juga bahwa pada masa pemerintahan Presiden Benigno Aquino ini Amerika Serikat menjadi malaikat penolong untuk Filipina dalam hal keamanan terutama dalam

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

konflik Laut Tiongkok Selatan yang memang menjadi satu-satunya hubungan Filipina Tiongkok dalam masa pemerintahan Presiden Benigno Aquino.[34]

Menyadari kondisi kepemimpinan yang terkenal kontroversial di samping sifatnya yang dikenal keras dan dapat dinilai ambisius terhadap penyimpangan sosial, mempengaruhi segala keputusan Presiden Duterte untuk melindungi wilayah kekuasaannya di Laut Cina Selatan,maka dalam konteks ini, Filipina mengimpor kapal perang *Strategic Sealift Vessel* dari PT PAL Indonesia.

3. Keseimbangan Kekuatan (*Balance of Power*)

Berkaitan dengan kondisi ekonomi dan militer, Filipina selama ini sangat bergantung dengan bantuan luar negeri dari Amerika Serikat. Di sisi lain, Presiden Duterte menyadari bahwa Tiongkok saat ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia yang baru, terutama dengan pendanaan tidak terbatasnya. Sehingga, membuat Presiden Duterte mencoba untuk bermain di dua kaki untuk meraih kepentingan nasional Filipina baik dari Amerika Serikat maupun Tiongkok. Terlihat adanya aktivitas militer Amerika Serikat di pangkalan Filipina untuk melaksanakan operasi navigasi di wilayah Laut Cina Selatan. Hal tersebut diyakini dapat melemahkan posisi Filipina untuk memenangkan arbitrasi wilayah yang

[34] Carl Thayer, "Analyzing the US-Philippines Enhanced Defense Cooperation Agreement," The Diplomat, 19 Oktober 2014, http://thediplomat.com/2014/05/analyzing-the-us-philippines-enhanced-defense-cooperationagreement/, diakses pada 11 November 2022 pukul 20.29 WIB

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

sedang dalam sengketa tersebut. Sementara itu, adanya peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kerja sama ekonomi dengan Tiongkok membuat Presiden Duterte memutuskan untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Tiongkok.[35]

Normalisasi hubungan dengan Tiongkok ini dilakukan mengingat Presiden Duterte berkeinginan untuk menarik investor Tiongkok ke Filipina. Motivasi Presiden Duterte menarik Investor Tiongkok untuk berinvestasi di Filipina adalah salah satu keinginan dan tujuan Presiden Duterte dalam perubahan kebijakan Filipina sewaktu bersengketa mengenai Laut Tiongkok Selatan. Menarik investor Tiongkok ini, guna membantu pengembangan Filipina pada beberapa sektor dan ketidak percayaan kepada AS.

Di samping itu, adanya perubahan kebijakan yang dilakukan Presiden Duterte ini dapat membuat investor Tiongkok semakin percaya untuk menanamkan saham mereka di Filipina. Kemudian, ini juga dibuktikan keterbukaan Filipina pada Tiongkok dalam mempererat hubungan bilateral Filipina dan Tiongkok semakin membantu menciptakan kepercayaan para investor Tiongkok. Memiliki hubungan yang baik dengan Tiongkok, Presiden Duterte percaya akan menghasilkan hasil yang baik bagi Filipina seperti, investasi proyek dan pembangunan infrastruktur di Filipina. Hal itu saat ini sangat dibutuhkan Filipina dalam

[35] Putri Anisa Febriani, "Politik Luar Negeri..., 12&100.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

pembangunan infrastruktur domestik yang dapat membantu memajukan Filipina dengan infrastruktur yang bagus.

Presiden Duterte memilih untuk melakukan kerja sama dengan Tiongkok. Hal ini dilakukan karena Presiden Duterte lebih fokus kepada peningkatan perdagangan dan ekonomi hubungan dengan Tiongkok kemudian adanya keinginan untuk memperdalam hubungan bilateral dengan Tiongkok. Perekonomian Tiongkok yang besar membuat Presiden Duterte untuk lebih mendekatkan diri kepada Tiongkok. Hal ini, juga diperkuat selama masa jabatan Presiden Duterte bahwa *Foreign Direct Investment* (FDI) dari Tiongkok mengalami peningkatan di Filipina. Peningkatan FDI Tiongkok ini terbilang cukup tinggi dari pada FDI pada masa presiden sebelumnya, Presiden Benigno Aquino III. Peluang ekonomi merupakan tujuan dari perubahan kebijakan, dengan dilatarbelakangi adanya keinginan Presiden Duterte untuk memanfaatkan perekonomian Tiongkok. Peluang Ekonomi ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Presiden Duterte. Peningkatan FDI Tiongkok menjadi salah satu hal yang menguntungkan bagi Filipina untuk meningkatkan perekonomian negara. Adanya peningkatan FDI Tiongkok di Filipina juga menjadikan bukti kedekatan hubungan bilateral antara Filipina dan Tiongkok

Melihat dari segi militer, Filipina bisa dikatakan sangat lemah bahkan di Kawasan Asia Tenggara. Menurut data yang dikutip dari *Index Power* yang dirilis *Global Fire Power* pada 2017, menempatkan Filipina

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

diurutan keenam. Bersamaan dengan upaya agresif Tiongkok dalam membangun pangkalan militer mereka di Laut Cina Selatan, maka Presiden Duterte harus berpikir ulang jika ingin berkonfrontasi militer secara langsung dengan Tiongkok. Sehingga pilihan terbaiknya adalah melakukan kerja sama dengan Tiongkok. Tetapi hal tersebut membuat Amerika Serikat menjadi geram karena Amerika Serikat hingga saat ini masih memiliki pangkalan militer di Filipina.[36]

Pada tahun 2017, operasi militer gabungan yang dinamakan Balikatan mengalami penurunan skala dimana pada pemerintahan Duterte operasi Balikatan hanya berfokus kepada urusan domestik Filipina seperti permasalahan kemanusiaan, dan penanggulangan bencana hingga counterterrorism. Berbeda dengan masa pemerintahan Arroyo dan juga Aquino III yang memiliki skala lebih besar dan bersifat eksternal hingga meliputi isu wilayah dan kemaritiman.

Sejalan dengan keinginan Duterte untuk menjauhkan Filipina dari poros aliansi kerjasama keamanan dengan AS, Duterte juga memiliki rencana yang bertentangan dari posisi strategis Filipina sebelumnya yaitu untuk mendekatkan diri dengan Tiongkok. Duterte memilih untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Tiongkok sebagai cara untuk membendung konflik maritim antara kedua negara di Laut China Selatan. Selain itu, Duterte juga ingin bekerjasama dengan Tiongkok untuk membantu pembangunan di Filipina khususnya di wilayah perairan

[36] Ibid., 100.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Filipina yang berdekatan dengan Laut China Selatan. Bahkan Duterte berencana untuk membangun aliansi keamanan dengan rival Amerika Serikat yaitu Tiongkok dan Rusia sebagai aliansi keamanan baru karena ia berniat untuk meninggalkan aliansinya dengan Amerika Serikat. Banyak susunan rencana yang telah disiapkan oleh Duterte untuk membangun kembali hubungan bilateral dengan Tiongkok. Hal itu juga dilakukan dengan maksud untuk menunjukkan kepada Amerika Serikat sebagai mitra keamanan Filipina sejak 1951 bahwasannya Filipina dapat bergerak secara independen dan memilih kawan atau negara untuk bekerja sama tanpa harus terbebani oleh keberadaan Amerika Serikat. Duterte juga ingin membuktikan kepada Amerika Serikat bahwa tanpa Amerika Serikat, Filipina akan tetap berdiri dan menjalankan tujuan dan kepentingannya dengan mitra lain yaitu Tiongkok yang juga merupakan *rising power.*

Preferensi pribadi Duterte sangat berperan besar dalam kebijakan luar negeri Filipina di masa administrasinya. Sejak masa kampanye presiden, Duterte secara lantang telah mengutarakan ketertarikannya untuk menjalin hubungan bilateral dengan Tiongkok. Ketertarikan tersebut memang terbukti dilakukan Duterte bersama Filipina pada masa administrasinya. Filipina awalnya melaporkan masalah sengketa maritim Laut China Selatan ke *Permanent Court of Arbitration* (PCA) pada masa presiden Aquino III dan baru mendapatkan hasilnya di pertengahan Juli 2016 dimana PCA menyatakan kemenangan Filipina atas sengketanya dengan Tiongkok. Akan tetapi untuk mewujudkan keinginannya dalam

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

membangun hubungan bilateral dengan Tiongkok, Duterte memilih untuk mengabaikan hasil keputusan PCA tersebut dengan asumsi bahwa penggunaan hasil keputusan PCA terkait sengketa Filipina dengan Tiongkok hanya akan menyinggung keberadaan Tiongkok yang akan membuat Tiongkok enggan untuk menjalin kerjasama dengan Filipina. Duterte menganggap Tiongkok sebagai mitra yang lebih strategis ketimbang Amerika Serikat karena Filipina dengan lebih gampang dapat membicarakan isu sengketa maritim langsung dengan Tiongkok tanpa harus melakukan *balancing* terhadap keberadaan Tiongkok di Laut China Selatan. Disisi lain, hal tersebut juga membuka peluang Filipina untuk bekerjasama dengan Tiongkok di bidang ekonomi dan investasi selain di bidang keamanan.

Berdasarkan kondisi perekonomian Filipina yang sedang mengalami pertumbuhan, namun jika melihat kondisi militernya yang masih lemah, menjadi salah satu alasan pemerintah Filipina mengeluarkan kebijakan untuk tujuannya memperkuat kondisi militer terutama di kawasan perairan demi pertahanan negara, yang salah satunya dilakukan dengan pengadaan modernisasi alutsista. Menurut konteks ini yaitu impor kapal perang jenis *Strategic Sealift Vessel* (SSV) dari PT PAL Indonesia.

4. Strategi Diplomatik

Pada tahun 2017 , Presiden Rodrigo Duterte memutuskan untuk mengirim pasukan dan melidungi wilayah yang diklaim Filipina atas Laut China Selatan khususnya di pulau *Sparatly* .Pada 12 Juni , Duterte

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

mengunjungi wilayah tersebut dan menaruh bendera sekian banyak sebagai hari peringatan kemerdekaan 119 tahun Filipina demi mencegah agretivitas China atas klaim teritorialnya.Duterte mengejar hubungan diplomatik yang baik dan mengabaikan keputusan PCA demi membangun kerjasama yang konstruktif dengan China.

Melihat pada sisi konteks internasional pada masa kepemimpinan Presiden Duterte, adanya momen kebangkitan ekonomi dan kekuatan militer Tiongkok membuat Presiden Duterte akhirnya mengarahkan politik luar negerinya terhadap Tiongkok dan melakukan normalisasi hubungan yang sempat mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Presiden sebelumnya yaitu Presiden Aquino III. Lalu, sebagai gantinya pada masa administrasi Presiden Duterte hubungan antara Filipina dengan Amerika Serikat semakin merenggang diakibatkan perubahan arah politik luar negeri Filipina tersebut. Pada masa pemerintahan Presiden Duterte didominasi oleh rasa nasionalisme dan identitas yang didasari pada sentimen imperialisme Amerika Serikat terhadap Filipina. Hal tersebut mendorong terjadinya kerenggangan hubungan antara kedua negara pada periode pemerintahan Presiden Duterte.[37]

Dalam masa pergantian Presiden Filipina pada pertengahan tahun 2016 lalu, membawa perubahan terhadap kebijakan Filipina dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan yang berkepanjangan. Perubahan kebijakan dibawah Presiden baru Filipina Rodrigo Duterte ini

[37] Ibid., 13-14.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

mengeluarkan kebijakan yang bertolak belakang dengan kebijakan Presiden Benigno Aquino III. Kebijakan Presiden sebelumnya bersikap keras untuk mengecam klaim Tiongkok. Filipina sekarang dalam sengketa Laut China Selatan ini lebih memilih untuk melakukan kerjasama bersama dengan Tiongkok dalam mengeksplorasi potensi yang ada di Laut China Selatan. Sebelumnya, pada masa kampanye Duterte yang pada saat itu posisinya ketika masih menjadi calon Presiden Filipina berjanji akan menyelesaikan konflik dan mengibarkan bendera Filipina di Laut China Selatan.[38]

Pada pertengahan 2016, Filipina mendapatkan ancaman dari Tiongkok, ancaman ini berupa ancaman perang yang akan dilakukan Tiongkok jika, Filipina berupaya menekankan keputusan PCA dan melakukan pengeboran minyak di kawasan Laut China Selatan. Ancaman yang berasal dari Tiongkok ini akan menjadikan kondisi kedua negara ini semakin memanas di Laut China Selatan.[39] Setelah adanya ancaman dari Tiongkok dan sebelum pada akhirnya Duterte memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan Tiongkok, Duterte mengatakan:

> "*In the play of politics, now, I will set aside the arbitral ruling. I will not impose anything on China*"[40]

[38] Heydarian, R. J. "New Dawn for Philippine-China Relations?", (5, Juni 2016) diakses pada 5 November 2022, dari Aljazeera.com: https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/06/dawn-philippinechina-relations-duterte-160604101429033.html

[39] Mogato, M. "Duterte says China's Xi Threatened War if Philippines Drills for Oil". (2017, Mei 19).diakses pada 11 November 2022, dari Reuters.com: https://www.reuters.com/article/us-southchinasea-philippineschina/duterte-says-chinas-xi-threatened-war-if-philippines-drills-for-oilidUSKCN18F1DJ

[40] South China Morning Post. "Duterte Says He'll Set Aside South China Sea Feud Ruling Against Beijing". (2016, Desember 17). Diakses pada 11 November 2022, dari South China Morning Post:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Duterte akan mengesampingkan hasil keputusan arbitrase internasional yang dikeluarkan pada pertengahan Juli 2016, untuk tidak memaksa Tiongkok mematuhi hasil keputusan guna memperbaiki hubungan antara Filipina dengan Tiongkok. Dengan pernyataan tersebut Presiden Duterte bermaksud untuk mengubah manajemen penyelesaian Laut China Selatan.[41]

Pada bulan Mei 2017, Duterte mengadakan kunjungan ke kapal-kapal perang Tiongkok yang tiba di kota Davao, Filipina. Hal ini dilakukan untuk pembangunan rasa kepercayaan diri dan niatan yang baik antara Filipina dan Tiongkok. Disamping itu juga, kunjungan ini dilalukan sebagai bentuk gerakan pribadi yang dilakukan Duterte, dimana kunjungan yang dilakukan Duterte tersebut membuktikan keputusannya dalam mengesampingkan hasil arbitrase internasional lalu.[42]

Dalam mengesampingkan hasil keputusan arbitrase internasional, Duterte berpendapat dalam sebuah artikel yang dimuat oleh South China Morning Post:

> "*The Philippines and other nations are helpless to stop the island-building, so there is no point challenging China in diplomatic and legal circle*"[43]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/2055433/dutertesays-hell-set-aside-south-china-sea-feud-ruling

[41] Ibid.

[42] Zhihao, Z. "Chinese Ships Pay Visit to Philippines". (2017, Mei 2). Diakses pada 11 November 2022, dari China Daily: http://europe.chinadaily.com.cn/a/201705/02/WS59bb95a2a310d4d9ab7eaf31.html

[43] South China Morning Post. "Duterte Says He'll Set Aside South China Sea Feud Ruling Against Beijing".

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa Duterte yakin bahwa negara-negara tidak ada yang bisa menghentikan aktifitas Tiongkok dalam pembangunan pulau di Laut China Selatan dan menurut Duterte tidak ada gunanya dalam menantang Tiongkok secara diplomatik maupun hukum, karena Tiongkok tidak akan mau untuk menaati atau mengikuti peraturan yang ada.[44]

Pernyataan yang dilontarkan Presiden Duterte, membuat banyak pihak terkejut. Presiden Duterte semakin membenarkan niatnya dalam mengubah manajemen pengelolaan konflik Laut China Selatan, Duterte berpendapat bahwa solusi yang tepat dalam kasus ini adalah melakukan perjanjian bersama Tiongkok untuk eksplorasi memanfaatkan potensi yang ada di Laut China Selatan. Dengan cara ini juga dapat membantu Filipina untuk memanfaatkan sumber daya alam di Laut China Selatan. Dalam artikel itu juga Presiden Duterte menambahkan bahwa jika terjadinya perang antara Tiongkok dan Filipina di Laut China Selatan maka Filipina tidak akan mampu untuk melawan Tiongkok, meskipun Filipina mempunyai negara aliansi yang besar seperti Amerika Serikat dengan kekuatan militer yang kuat. Duterte juga berpikir dan mengatakan bahwa tidak ada yang dapat menjamin Amerika Serikat akan di pihak Asia Tenggara ketika terjadinya perang. Pernyataan yang dilontarkan ini juga menegaskan bahwa Presiden Duterte ingin mengambil jalan yang aman dimana kemampuan yang dimiliki Filipina dalam bidang militer masih

[44] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

dianggap belum cukup untuk melawan militer Tiongkok dalam peperangan.[45]

5. Transaksi Ekonomi

Filipina melakukan kegiatan impor kapal perang dengan jenis SSV yang di buat oleh Indonesia pertama kali pada 8 Mei 2016 melalui proses pelepasan kapal yang dilakukan oleh bapak Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden Indonesia pada saat itu.[46] Pada tahun 2017, Filipina mengimpor kapal perang kedua jenis Strategic Sealift Vessel (SSV) buatan PT PAL Indonesia. Kapal kedua Strategic Sealift Vessel (SSV) 123 meter bernama BRP Davao Del Sur-602 yang akan diserahkan kepada Departemen Pertahanan Nasional (DND) Filipina meninggalkan tempat kelahirannya PT PAL Indonesia di Dermaga Ujung Surabaya untuk berlayar selama lima hari mengarungi Laut Jawa, kemudian menyusuri Selat Makassar, memasuki Laut Sulawesi dan Laut Sulu sebelum berlabuh di pangkalannya kelak di Manila, Filipina.

6. Mempertahankan Pekerjaan Industri Domestik

[45] Ibid.
[46] Petrus Riski, "PT PAL Ekspor Perdana Kapal Perang ke Filipina", dalam https://www.voaindonesia.com/a/pt-pal-ekspor-perdana-kapal-perang-ke-filipina/3320818.html, diakses pada 1 Juni 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu melakukan kunjungan kehormatan kepada Menteri Pertahanan Philipina Gazmin T. Voltaire, pada 21 Juni 2016 di Kementerian Pertahanan Filipina, Manila. Kunjungan ini dilakukan sehari setelah menghadiri pertemuan trilateral bersama Menhan Filipina dan Menhan Malaysia. Dalam kunjungan ini, Menhan RI dan Menhan Filipina melakukan pertemuan bilateral guna membahas upaya peningkatan kerja sama pertahanan kedua negara yang telah terjalin baik. Hubungan bilateral yang kuat antara kedua negara diharapkan akan mendukung penguatan kerja sama trilateral antara Indonesia, Filipina dan Malaysia khususnya dalam kerja sama pengamanan maritim.[47]

Menhan Filipina menyampaikan bahwa hubungan bilateral yang kuat antar kedua negara, akan mendukung penguatan hubungan trilateral untuk menjamin stabilitas keamanan di kawasan. Terlebih antara Indonesia dan Filipina telah memiliki modal perjanjian perbatasan 1975 dan perjanjian delimitasi batas maritim tahun 2014. Dalam kesempatan tersebut, Menhan Filipina juga menyampaikan bahwa pertemuan trilateral sebelumnya, telah menghasilkan sebuah komitmen terhadap langkah-langkah bagi terpeliharanya stabilitas di kawasan perbatasan. Melalui diskusi tersebut, ketiga negara akan berkontribusi secara efisien terhadap perjanjian-perjanjian yang telah dicapai.[48]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[47] Kementerian Pertahanan RI, "Menhan RI dan Menhan Filipina Bahas Peningkatan Kerja sama Pertahanan", https://www.kemhan.go.id/2016/06/21/menhan-ri-dan-menhan-philipina-bahas-peningkatan-kerja sama-pertahanan.html, diakses pada 29 September 2022.
[48] Ibid.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Indonesia dan Filipina menyepakati kerja sama di bidang logistik dan industri pertahanan yang ditandai dengan penandatangan *Memorandum of Understanding on Logistics and Defence Industry Cooperation Between The Goverment of The Republic of Indonesia and The Goverment of The Republic of Philippines*. MoU tersebut ditandatangani oleh Direktur Potensi Pertahaan Kementerian Pertahanan RI Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si., bersama dengan *Undersecretary for Finance and Material, Departement of National Defense of Philippines Air* Marshal (Ret) Raymundo DV Elefante, pada 27 Februari 2020 di Aula Abdi Negara Gedung R. Suprapto lantai 8.[49]

Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat dari lingkungan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, perwakilan Direktur Utama Industri Pertahanan Indonesia, Pejabat Eselon III dan perwakilan Eselon IV Ditjen Pothan Kemhan. Sedangkan dari pihak Filipina, turut hadir Duta Besar Filipina untuk Indonesia dan Atase Pertahanan Filipina di Jakarta. Dalam jumpa pers, Dirjen Pothan Kemhan menyampaikan bahwa MoU ini mengenai kerja sama logistik industri pertahanan yang menjadi payung hukum kerja sama kedua negara khususnya industri pertahanan. Indonesia berharap bisa ikut berpartisipasi dalam proses *procurement* alutsista melalui G to G di negara Filipina dan dapat men-

[49] Kementerian Pertahanan RI, "Penandatanganan MoU Kerja sama Bidang Logistik dan Industri Pertahanan", https://www.kemhan.go.id/pothan/2020/03/03/penandatanganan-mou-kerja sama-bidang-logistik-dan-industri-pertahanan.html, diakses pada 4 Oktober.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

suplay kebutuhan material pertahanan Filipina. Sebelumnya, Filipina telah membeli produk-produk industri pertahanan Indonesia, seperti: kapal SSV buatan PT PAL Indonesia, dan juga produk pesawat dari PT DI (Persero) dan lain-lain.[50]

Sementara itu, *Undersecretary for Finance and Material, Departement of National Defense of Philippines Air* Marshal (Ret) Raymundo DV Elefante mengatakan bahwa sebagai dua negara yang bertetangga, selama ini hubungan kerja sama Indonesia dan Filipina khususnya di bidang pertahanan telah terjalin baik. Terlebih dengan ditandatanganinya MoU kerja sama logistik dan industri pertahanan ini, diharapkan akan menjadi awal yang baik bagi peningkatan kerja sama kedua negara khususnya di bidang industri pertahanan. Penandatanganan MoU kerja sama bidang logistik dan industri pertahanan berjalan dengan tertib, aman, dan lancar.[51]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

D. Kerja Sama Filipina-Indonesia JDSCC dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan

Di bidang pertahanan dan keamanan, saat ini Indonesia dan Filipina memiliki forum bilateral *Joint Defense and Security Cooperation Committee* (*JDSCC*) setingkat Dirjen Kemhan dan PT PAL Indonesia oleh

[50] Ibid.
[51] Ibid.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Wilgo Zainar menandatangani kontrak jual beli kapal perang jenis *Strategic Sealift Vessel* dengan Menteri Pertahanan Filipina,Delfin N.Lorenzana.Untuk mengetahui proses terciptanya kerjasama *JDSCC* pada tahun 2021 ini, maka akan dicari menggunakan teori K.J.Holsti.

1. Pengaruh diplomatik

Masa kepemimpinan Presiden Duterte dimulai sejak dilantiknya Presiden Duterte sebagai Presiden Filipina pada 30 Juni 2016 dan berakhir pada 30 Juni 2022. Karena 1 periode kepemimpinan Presiden Filipina yaitu sama dengan 6 tahun masa kepemimpinan. Sehingga pada tahun ini, periode kepemimpinan dan segala kebijakan yang diambil, masih berada di bawah kuasa Presiden Duterte.

Di bawah pemerintahan Presiden Duterte juga, adanya investasi Tiongkok mengenai kebijakan *belt and road initiative*. Kebijakan Tiongkok ini dimulai pada tahun 2016, kebijakan ini dilakukan untuk membuka jalur perdagangan luar negeri yaitu dengan berinvestasi dalam membangun infrastruktur di 100 negara. Tiongkok melakukan investasi di Filipina juga karena salah satu kota di Filipina yaitu Davao merupakan kota yang strategis, dimana Davao ditempatkan sebagai orang-orang Tiongkok untuk melakukan pengiriman sumber daya mineral. Tiongkok berinvestasi di Filipina dalam upaya pembaruan infrastruktur senilai $169 miliar, kontrak ini belaku hingga lima tahun pada masa jabatan Presiden Duterte. Dengan adanya investasi dengan jumlah yang besar ini juga

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

menjadi sebuah motivasi dari Filipina untuk mendorong lebih banyak lagi investasi Tiongkok di Filipina[52]

Pada masa pemerintahan Duterte, Duterte juga membuat kebijakan untuk melakukan eksplorasi pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Laut China Selatan. Kebijakan ini juga yang dianggap dapat membantu Filipina dalam mengatasi permasalahan krisis sumber daya alam Filipina. Sumber daya alam yang terdapat di laut Tiongkok selatan, menjadikan kawasan laut Tiongkok selatan sebagai kawasan yang menguntungkan bagi negara yang menguasai laut Tiongkok selatan. Permasalahan demi permasalahan telah terjadi di kawasan ini, laut Tiongkok selatan banyak diperebutkan berbagai negara di sekitarnya. Filipina dan Tiongkok sudah lama menjadi salah satu negara yang memperebutkan kawasan ini. Pada akhirnya, kedua negara ini memutuskan untuk menjalin kerja sama guna memanfaatkan sumber daya alam di Laut China Selatan. Perubahan kebijakan Filipina yang dilakukan Presiden Duterte juga dikarenakan, adanya prediksi bahwa cadangan minyak Filipina akan habis pada tahun 2020.[53]

Prediksi ini membuat pemerintah Filipina untuk mencari cadangan sumber daya alam yang baru untuk mencukupi kebutuhan energi di Filipina. Jika menipisnya cadangan gas alam dan minyak Filipina, maka membuat Filipina harus mengimpor gas alam dan minyak. Impor gas alam

[52] Nevreda Arbian Ristantya " Terpilihnya Duterte sebagai presiden Filipina tahun 2016" , (Skripsi-Universitas Pembangunan Nasional "Veteran",Yogyakarta,2018)
[53] BBC ,soal sumber daya laut china selatan, 23 April 2021,diakses pada 8 November 2022

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

dan minyak untuk mencukupi kebutuhan negara, Filipina harus mengeluarkan biaya yang besar untuk impor sumber daya alam dari negara lain. Hal ini menjadi masalah yang serius bagi negara Filipina dan dibutuhkannya solusi yang tepat untuk menangani masalah tersebut. Presiden Duterte dalam masalah ini lebih memilih untuk melakukan perubahan baru pada kebijakan Filipina untuk mengatasi masalah krisis sumber daya alam yang akan dialami oleh Filipina. Adanya kekhawatiran ini juga, menjadi salah satu faktor pendukung perubahan kebijakan Filipina dalam sengketa laut Tiongkok selatan. Dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki laut Tiongkok selatan diperkirakan ada sekitar 900 triliun kaki kubik cadangan gas alam dimana jumlah tersebut juga setara dengan cadangan minyak yang dimiliki Qatar. Kemudian, adanya cadangan minyak sebanyak 28 miliar barel menurut Lembaga Informasi Energi Amerika[54]

2. Melindungi Negara dari Ancaman Domestik dan Eksternal

Pada Tahun 2021, kondisi Laut China Selatan kembali memburuk dengan adanya 200 kapal perang China masuk perairan wilayah sengketa. Presiden Duterte geram dan berani ancam Xi-Jinping. “Saya tidak begitu tertarik sekarang pada memancing,saya tidak berpikir ada cukup ikan untuk diperdebatkan,tetapi ketika kita mulai menambang,ketika kita mulai mendapatkan apa pun yang ada di perut Laut China Selatan,minyak

[54] CNN soal laut china selatan, 25 April 2021,diakses pada 8 November 2022

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

kita,pada saat itu saya akan mengirim kapal-kapal militer kesana untuk mengajukan klaim" Ujarnya melihat kepada persoalan kerap masuknya kapal China[55] .

Presiden Duterte menyampaikan 5 point penting diantaranya siap mengirim kapal militer ke Laut Cina Selatan, berjanji mengingatkan China jika ada aktivitas pengeboran,Filipina ingin memanfaatkan sumber daya Laut China Selatan, Oposisi Filipina dianggap tidak tegas oleh China terkait wilayah sengketa dan 200 kapal China sudah memasuki ke wilayah sengketa Filipina. Hal ini membuat Presiden Duterte semakin kuat dalam menjaga pertahanan nasionalnya dengan wataknya sangat tegas, bijaksana dan kontroversial dalam mengahadapi persoalan Laut China Selatan.

Sebelumnya, Filipina – AS sudah membuat latihan tempur gabungan yang sudah dilakukan selama dua minggu semenjak 11 April 2021 dengan perincian 700 tentara Amerika Serikat dan 1.300 militer Filipina yang berlokasi di zona melingkar radius 5km di Laut China Selatan,Barat Semenanjung Leizhou..Latihan dilakukan seiring manuver China di wilayah sengketa Laut China Selatan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

3. Keseimbangan Kekuatan (*Balance of Power*)

Seorang pejabat Negara Filipina, Sekretaris Perencanaan Ekonomi Karl Kendrick Chua meramalkan bahwa ekonomi negaranya akan

[55] CNBC soal laut china selatan,Duterte ancam Xi-Jinping 21 April 2021,diakses pada 8 November 2022

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

membutuhkan lebih dari satu dekade untuk kembali ke pertumbuhan pra-pandemi. Penguncian selama pandemi *Covid*-19 telah melumpuhkan ekonomi hampir di seluruh dunia, dan tentunya butuh waktu lama untuk kembali pulih seperti sebelum saat pandemi. Pernyataan Mengingat penguncian dan pembatasan lain yang bertujuan untuk memperlambat penyebaran virus *Covid*-19 telah menghancurkan ekonomi negara Asia Tenggara, membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan dan membuat banyak keluarga miskin kelaparan.[56]

Dikutip dari *AFP*, Sekretaris Perencanaan Ekonomi Chua menyampaikan bahwa total biaya jangka panjang dari *Covid*-19 dan karantina, baik untuk masyarakat sekarang dan masa depan akan mencapai 41,4 triliun peso (setara 810 miliar dolar AS). Artinya, angka tersebut lebih dari dua kali produk domestik bruto Filipina pada 2020, yang diperkirakan Bank Dunia sebesar 361,5 miliar dolar AS. Diindikasikan kerugian akan terasa selama 10 hingga 40 tahun ke depan. Produktivitas yang lebih rendah disebabkan oleh kematian, penyakit, atau kurangnya sekolah selama pandemi kemungkinan akan bersifat permanen. Hampir 70% ekonomi, termasuk 23,3 juta pekerja, berada di bawah pembatasan karantina.[57]

Terkait kapasitas militer Filipina, Kepala Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) Cirilito Sobejana ketika melakukan kunjungan pulau

[56] Reni Erina, "Butuh Waktu 10-40 Tahun Hingga Ekonomi Filipina Bangkit Seperti Sebelum Pandemi", https://dunia.rmol.id/read/2021/10/01/506433/butuh-waktu-10-40-tahun-hingga-ekonomi-filipina-bangkit-seperti-sebelum-pandemi, diakses pada 28 September 2022.
[57] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

berterumbu karang yang berkedudukan di Laut Cina Selatan, memberikan pujian kepada para tentara atas peran mereka dalam melindungi para penduduk pulau dan wilayah-wilayah negara di jalur perairan yang strategis. Kepala AFP Sobejana ingin memeriksa pulau tersebut untuk mengawasi rencana perubahan atas pulau tersebut menjadi pusat logistik agar mempermudah aset angkatan laut melakukan patroli pengisian bahan bakar. Kepala AFP Sobejana juga menyatakan bahwa para pasukan memiliki semangat dan tingkat moral yang tinggi.[58]

4. Strategi Diplomatik

Presiden Duterte berusaha untuk melakukan hubungan bilateral yang baik dengan China. China dianggap sebagai negara yang mempunyai potensi sumber invetasi asing yang besar , yang mana insfrastruktur menjadi target utamanya. Namun pada faktanya , sebagian besar tidak berhasil , kedua negara masih terlibat sengketa territorial dalam eksplorasi minyak bersama di wilayah Laut China Selatan. Hubungan AS – Filipina melemah hingga mencapai titik terendah pada Februari 2020 , ketika pemerintah Duterte mengisyaratkan untuk mengakhiri perjanjian pasukan kunjungan Filipina – AS (VFA) yang berfungsi sebagai militer bilateral . Melihat kondisi semakin memburuk di wilayah Laut China Selatan , Pada Juli 2021,akhirnya Duterte mengajak kembali kerja sama bilateral yang sempat memburuk dan memperbarui aturan terhadap (VFA). Pada

[58] Mulyo Sunyoto, "Panglima Militer Filipina Kunjungi Pulau di Perairan Sengketa", https://www.antaranews.com/berita/2200994/panglima-militer-filipina-kunjungi-pulau-di-perairan-sengketa, diakses pada 29 September 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

November 2021 , Amerika Serikat dan Filipina mengadakan dialog strategis bilateral. Kedua negara berkomitmen untuk saling menegakan tatanan maritim berbasis aturan di Laut China Selatan dan memperkuat angkatan bersenjata AS – Filipina[59].

Menjelang pemilihan presiden di Filipina di tahun 2022, kondisi politik menghangat di negara tersebut. Terdapat kubu Rodrigo Duterte. dan Manny Pacquiao. Filipina sangat ketat membatasi masa kekuasaan presiden. Seseorang hanya boleh dipilih satu kali sebagai presiden dengan periode kepemimpinan selama 6 tahun. Presiden Duterte yang berkuasa lewat pemilihan 2016 akan mengakhiri jabatannya di tahun 2022. Tak ada kesempatan lagi baginya untuk menjadi orang nomor satu di Negara Filipina. Namun, mencuat ke permukaan rencana Presiden Duterte untuk maju dalam pemilihan wakil presiden.[60]

Rencana tersebut pernah disampaikan Presiden Duterte pekan silam kepada publik. Secara hukum tak ada larangan untuk melakukan hal tersebut, tetapi dari segi etis dan semangat demokrasi, akan memicu kontroversi. Dalam rencana Presiden Duterte maju sebagai calon wakil presiden, posisi calon presiden kemungkinan akan diisi oleh Senator Lawrence Go, orang dekatnya. Namun, Go menolak rencana itu dan mempersilakan orang lain menjadi capres. Sedangkan dirinya akan fokus menangani pandemi. Nama lain yang disebut dapat mengisi posisi capres

[59] Aliansi AS-Filipina Kembali ke Jalurnya ,"Pos Pagi Cina Selatan, 24 Oktober 2021

[60] A Tomy Trinugroho, "Politik Menghangat di Filipina", https://www.kompas.id/baca/opini/2021/09/01/politik-menghangat-di-filipina?, diakses pada 29 September 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

yaitu Sara, anak perempuan Presiden Duterte yang sedang menjabat sebagai Walikota Davao, posisi yang sebelumnya dipegang sang ayah.[61]

Di Filipina, capres dan cawapres dipilih secara terpisah. Mereka tidak maju dalam satu paket seperti di kebanyakan negara yang menganut sistem presidensial. Namun, rencana Presiden Duterte maju sebagai cawapres diindikasikan tak berjalan mulus. Di partai tempat Duterte bernaung, PDP-Laban, muncul kekuatan penghadang. Kubu ini memiliki sosok populer yaitu petinju Manny Pacquiao yang juga merupakan senator. Belum lama ini kubu Pacquiao mendeklarasikan kepengurusan anyar PDP-Laban yang tidak menyertakan Presiden Duterte. Presiden Duterte memiliki pendekatan politik yang keras. Tekanan dilakukan kepada pengkritiknya. Kebijakannya menangani problem narkoba memicu kontroversi. Beribu orang diperkirakan meninggal akibat kekerasan dalam perburuan bandar narkoba.[62]

Ada yang menyebutkan bahwa rencana Presiden Duterte menjadi wapres bertujuan untuk mencegah penyelidikan atas dirinya terkait kebijakan memerangi bandar narkoba. Dalam kebijakan luar negeri, Presiden Duterte condong ke Cina, mengingat negara tersebut mau membantu Filipina tanpa bawel soal hak asasi. Maka, sikapnya terhadap Beijing dalam isu Laut Cina Selatan tidak garang. Di sisi lain, Presiden Duterte berupaya mengurangi ketergantungan Filipina pada Amerika

[61] Ibid.
[62] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Serikat dalam hal pertahanan. Presiden Duterte dikenal pro masyarakat menengah bawah. Sebagaimana di negara-negara lainnya, suhu politik akan semakin meningkat menjelang pilpres. Namun di samping itu, hal terpenting yaitu siapa pun yang terpilih harus mengutamakan keselamatan rakyat, membela negara, serta tak mencari keuntungan bagi diri dan kelompoknya.[63]

Berangkat dari fakta tersebut di atas, dikutip dari sumber lain didapatkan fakta bahwa Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengumumkan akan pensiun dari dunia politik. Dia menyatakan batal mencalonkan diri sebagai wakil presiden dalam pemilihan presiden tahun depan atau usai masa jabatannya berakhir. Presiden Duterte mengatakan banyak warga Filipina menolak rencananya mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Hal tersebut diketahui melalui sejumlah survei dan forum publik dalam beberapa waktu terakhir. Presiden Duterte menyatakan bahwa sentimen yang luar biasa dari masyarakat Filipina akan membuatnya tidak memenuhi syarat, karena hal tersebut akan menjadi pelanggaran konstitusi.[64]

5. Transaksi Ekonomi

Indonesia dan Filipina telah menjalin kerja sama pertahanan dan telah memiliki *Memorandum of Understanding* (MoU) di bidang logistik serta industri pertahanan. Industri pertahanan Indonesia diharapkan dapat

[63] Ibid.
[64] CNN Indonesia, "Presiden Filipina Rodrigo Duterte Umumkan Mundur dari Politik", https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211002165738-106-702554/presiden-filipina-rodrigo-duterte-umumkan-mundur-dari-politik, diakses pada 30 September 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

menjadi pilihan dalam rencana modernisasi alutsista Filipina. Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto bertemu dengan *Secretary Of National Defence* Filipina H.E. Mr. Delfin Negrillo Lorenzana, di sela-sela pelaksanaan *Trilateral Ministers' Meeting* di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, Menhan Prabowo menyampaikan bahwa pentingnya meningkatkan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Filipina, dalam semangat persaudaraan dan prinsip saling menghormati.[65]

Di bidang industri pertahanan, Indonesia mengapresiasi atas kepercayaan pemerintah Filipina yang memesan dua kapal angkut *Strategic Sealift Vessel* (SSV) dari PT PAL tahun 2014. Kapal SSV 1 (BRP Tarlac-Philippines) diserahkan ke Filipina pada 13 Mei 2016 dan Kapal SSV 2 (BRP Davao Del Sur-Philippines) pada 8 Mei 2017. Menhan Prabowo berharap, Indonesia dan Filipina dapat berperan lebih besar dalam membangun perdamaian dunia, serta menerapkan *soft power* sebagai bentuk diplomasi untuk memberantas radikalisme atau terorisme dengan meningkatkan aktivitas saling berbagi informasi sebagai bagian dari upaya kontra-terorisme dan mendukung kegiatan deradikalisasi.[66] Kemudian untuk ketiga kalinya, PT PAL Indonesia menandatangani kontrak jual beli kapal perang Landing Dock atau jenis SSV oleh CMO PT

[65] Biro Humas Setjen Kemhan, "Menhan Prabowo: Industri Pertahanan Indonesia Diharapkan Jadi Pilihan Modernisasi Alutsista Filipina", https://www.kemhan.go.id/2022/03/29/menhan-prabowo-industri-pertahanan-indonesia-diharapkan-jadi-pilihan-modernisasi-alutsista-filipina.html, diakses pada 1 Oktober 2022.
[66] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

PAL Indonesia, Wilgo Zainar dengan Menteri Pertahanan Filipina, Delfin N. Lorenzana pada 10 Juni 2022.

6. Mempertahankan Pekerjaan Industri Senjata Domestik

Dengan adanya repetitif hubungan Filipina-Indonesia mengenai kontrak jual beli kapal perang jenis *Strategic Sealift Vessel* ,maka PT.PAL Indonesia tetap memproduksi dan mengekspor ke Filipina untuk menambah kebutuhan alutsistanya.Hal tersebut menguntungkan bagi Indonesia dan menjadi pertimbangan untuk mempertahankan industri senjata maupun kendaraan tempur di tempat asal domestiknya.Di bidang pertahanan dan keamanan, saat ini Indonesia dan Filipina memiliki forum bilateral *Joint Defense and Security Cooperation Committee* (JDSCC) setingkat Dirjen Kemhan. Forum tersebut membahas terkait tantangan keamanan di kawasan perbatasan, pembaruan kerja sama bilateral kedua negara, industri pertahanan dan kerja sama di kawasan perbatasan. JDSCC terakhir kali diadakan secara virtual pada 13 Desember 2021. Selanjutnya, Indonesia yang akan menjadi tuan rumah pada forum JDSCC September 2022. Indonesia dan Filipina juga melaksanakan kerja sama militer dalam kerangka *Philindo MC* (Kerja sama Militer Filipina-Indonesia) yang meliputi beberpa bidang di antaranya: intelijen, patroli perbatasan terkoordinasi, operasi dan pelatihan, pendidikan dan pelatihan, *service to*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

service working group, kunjungan petinggi angkatan bersenjata kedua negara, pelatihan atau kursus, dan kegiatan lain yang disepakati bersama. Kerja sama lain yang telah dilakukan antara lain di bidang komite perbatasan, yaitu kerja sama antara angkatan laut kedua negara (*navy to navy talks*).[67]

> "Seluruh negara ASEAN termasuk Filipina, diharapkan terus mendukung dan menjaga sentralitas ASEAN dalam menghadapi tantangan regional. Perdamaian dan stabilitas adalah landasan kemajuan dan pembangunan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan." Kata Menhan Prabowo.[68]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[67] Ibid.
[68] Ibid.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penyajian dan analisis data, dapat diambil kesimpulan bahwa impor kapal perang jenis SSV berpengaruh terhadap perkembangan kerja sama militer Filipina-Indonesia.Dalam perdagangan internasional,Filipina memerlukan atensi dari negara lain untuk meningkatkan alutsistanya. Sedangkan Indonesia memerlukan atensi terkait kebutuhan peningkatan ekonomi dari negara lain.

Adapun perbedaan antara kerja sama sebelum impor dan sesudah impor yaitu di motif ekonominya.Kerja sama Filipina Indonesia sebelum impor hanya bermotif dalam hal politik dan keamanan internasional seperti *Joint Comission,Joint Border Commite,Border Patrol Agreement* dan *Border Crossing Agreement* yang bertujuan untuk patroli perbatasan, komunikasi, pengaturan lalu lintas perbatasan, latihan bersama, pengembangan sumber daya manusia dan intelijen.Namun tidak memasukkan motif ekonomi dan pembelian senjata di dalamnya.Sedangkan Kerja sama Filipina Indonesia sesudah impor mempunyai motif ekonomi,politik dan keamanan internasional.Pada tahun 2014, Kementerian Pertahanan Filipina mengadakan tender internasional pengadaan kapal perang yang bernilai kontrak sebesar USD 90 juta. Mengingat adanya permasalahan sengketa di wilayah Laut Cina Selatan.Pada Tahun 2016,Hubungan antara Filipina dan Indonesia berlanjut dalam kerja sama bidang logistik dan industri pertahanan MoU (*Memorandum*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

of Understanding) dengan motivasi peningkatan ekonomi.Pada tahun 2021, Indonesia dan Filipina menandatangani kontrak jual beli kapal perang jenis *Strategic Sealift Vessel* dan menyepakati kerja sama dalam bidang pertahanan dan keamanan *Joint Defense and Security Cooperation Committee* (JDSCC) setingkat Dirjen Kemhan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, adanya kerja sama militer Indonesia dan Filipina di bidang pertahanan dan keamanan, hendaknya dapat dipertahankan selama masih menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat menambah referensi bagi konsentrasi keilmuan Hubungan Internasional, khususnya dalam kajian perdagangan internasional dan kerja sama militer.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djelantik, Sukawarsini. *Diplomasi Antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: PT. Graha Ilmu, 2008.

Hartung,William D. dan Jennifer Washburn ,Arms Trade Resource Center,Arms trade to a military regime.

Holsti, K.J, *Politik Internasional,Kerangka Analisa,*Penerjemah : Juwono Sudarsono,pedoman ilmu jaya,1987

Holsti, K.J, *International Politics,A Framework for Analysis,* sixth edition,1992,prentice hall,1992

Holsti, K.J, *Politik Internasional II,kerangka untuk analisis,*Penerjemah: M.Tahir Azhary ; Editor:Herman Sinaga,Erlangga,Jakarta, 1988

Hutabarat, Roselyne. *Transaksi Ekspor Impor*. Jakarta: Erlangga, 1997.

Jackson,Robert, and Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional,*Pustaka Pelajar,Yogyakarta,2005

Miles, Mathew B., dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru/Matthew B Miles dan A. Michael Huberman*. Terj. Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1920.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

-------. *Pendekatan Kualitatif.* Jakarta: Rineka Cipta, 2021.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia. 2012.

Rosidi, Imron. *Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2005.

Salvatore, Dominick. *Ekonomi Internasional*, Jilid 1. Terj. Haris Munandar. Jakarta: Erlangga, 1997.

Sugiono, Muhadi. *Global Government Sebagai Agenda Penelitian dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung. 2015.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan Cetakan Kelima.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Artikel

Amador III, Julio S., et al. "*The Philippine's Foreign Policy and Relation Towards Major Power*". *Asia Centre dan DGRIS*. 2015.

Iqbal, Aji Muhammad. "Kerja sama Indonesia dengan Belanda dalam Pengembangan Proyek Pembuatan Kapal Frigate". *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 9 (1), 2021.

Kusuma, Endra, dan Syaiful Anwar. "*Implementation of the Philippines-Indonesia Coordinated Patrol Sea Border Area of Indonesia and the Philippines from the Sea Power Perspective*". *Journal of Social and Political Science*, 3 (4).

Mawaddah, Anisa. "Kerja sama Industri dan Infrastruktur Maritim antara Indonesia-Denmark 2015-2020", *Journal Hubungan Internasional*, 10 (1). 2022.

Misya, M. Herry. "Efektivitas *Joint Press Statement* dalam Menanggulangi Ancaman Abu Sayyaf di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina". *JOM FISIP*, 4 (2). 2017.

Musyaqqat, Syafaat Rahman. "Merajut Relasi Menggenggam Tradisi: Masyarakat Nusa Utara Dalam Diplomasi Maritim Indonesia–Filipina (1955−1974)" *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 13 (2). 2019.

Rosario, "*Philippine Foreign Policy Today*".

Secretary Albert del Rosario. "*Philippine Foreign Today*". *Stratbase Research Institute*. 2011.

Uno, Exellano Ramadhan. "Upaya Kerja sama Pemerintah Indonesia-Filipina dalam Memberantas Kegiatan *IUU Fishing* di Perbatasan Kedua Negara Khususnya Laut Sulawesi 2014-2016". *Journal of International Relations*, 3 (4). 2014.

Widodo, Pujo, et al. "Strategi Penjagaan Perbatasan Laut: Indonesia dan Filipina dalam Mencegah Ancaman Insurjensi di Sulawesi Utara". *Jurnal Prodi Perang Asimetris*, 4 (2). 2018.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Skripsi

Ambarwati, Zenita Nuringtyas. "Analisis Kepentingan Nasional Indonesia dalam Kerja sama '*Engineering and Manufacturing Development Phase of Joint Development* KF-VIF-X' dengan Korea Selatan Tahun 2014". Skripsi—Universitas Brawijaya, Malang, 2018.

Angela, Meilia Widad. "Implementasi Strategi *Rebalance Toward* Asia-Pacific Amerika Serikat Terhadap Filipina pada Tahun 2011-2016". Skripsi—Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016.

Fitriahningsih, Andi Siti Chadijah. "Kerja sama Militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan *Armed Forces of The Philippines* (AFP) di Daerah Perbatasan Miangas-Indonesia dan Davao-Filipina". Skripsi—Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.

Hakim (El), Akhmad Qelbi. "Kerja Sama Indonesia-Filipina dalam Mencegah dan Memberantas Kejahatan Transnasional di Indonesia dan Filipina Khususnya Perdagangan Narkoba/Obat-Obatan Terlarang Periode 2011-2016". Skripsi—Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, 2018.

Hutagalung, Irfan R. "Kerja sama Keamanan Indonesia Dengan Filipina Dalam Menghadapi Ancaman Kelompok Abu Sayyaf Tahun 2016". Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Maisitha, Miftha Loro. "Kerja sama Pertahanan Indonesia dengan Filipina dalam Memberantas *Piracy and Armed Robbery Ship Periode 2012-2015*". Skripsi—Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, 2018.

Nugroho, Arif Yanfa. "Kerja sama Industri Pertahanan Indonesia − Turki dalam Pengembangan Modern Medium Weight Tank". Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.

Pratama, Muhammad Darley Alfian. "Pengaruh kerja sama Indonesia-Bangladesh di bidang pengkeretaapian terhadap pembentukan *Indonesia Bangladesh Preferential Trade Agreement* (IB-PTA) tahun 2018". Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

Rabbani, Valery Fathur. "Kerja sama Indonesia dan Filipina Dalam Menghadapi Kasus Pembajakan Kapal di Wilayah Perbatasan Pada Tahun 2016-2018",. Skripsi—Universitas Islam Indonesia, 2019.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Internet

Agestu, Ike. "Indonesia Ikut Tender Alutsista Filipina". https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141217172403-106-18867/indonesia-ikut-tender-alutsista-militer-filipina, diakses pada 3 Oktober 2022.

BBC News. "*Philippines Country Profile*". http://www.bbc.co.uk/news/worldasia-15521300, diakses pada 26 September 2022.

Biro Humas Setjen Kemhan. "Menhan Prabowo: Industri Pertahanan Indonesia Diharapkan Jadi Pilihan Modernisasi Alutsista Filipina". https://www.kemhan.go.id/2022/03/29/menhan-prabowo-industri-pertahanan-indonesia-diharapkan-jadi-pilihan-modernisasi-alutsista-filipina.html, diakses pada 1 Oktober 2022.

Chandra, Ardan. "Filipina Beli Kapal Perang BUMN *Made in* Surabaya". https://finance.detik.com/industri/d-6145164/top-banget-filipina-beli-kapal-perang-bumn-made-in-surabaya/1, diakses pada 16 Agustus 2022.

Departemen Humas PT PAL Indonesia (Persero). "SSV Penakluk Samudera Karya PT PAL (Persero)". https://www.pal.co.id/2020/08/publikasi/artikel/ssv-penakluk-samudera-karya-pt-pal-indonesia-persero/, diakses pada 8 September 2022.

Farmita, Rachmi. "Pertama dalam Sejarah, Indonesia Ekspor Kapal Perang SSV-1". dalam https://bisnis.tempo.co/read/737169/pertama-dalam-sejarah-indonesia-ekspor-kapal-perang-ssv-1, diakses pada 30 Juni 2022.

Kementerian Pertahanan RI, "*Indonesian Defence White Paper*", dalam https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/05/2015-INDONESIA-DEFENCE-WHITE-PAPER-ENGLISH-VERSION.pdf, diakses pada 5 Januari 2023.

-------. "Menhan RI dan Menhan Filipina Bahas Peningkatan Kerja sama Pertahanan". https://www.kemhan.go.id/2016/06/21/menhan-ri-dan-menhan-philipina-bahas-peningkatan-kerja sama-pertahanan.html, diakses pada 29 September 2022.

-------. "Penandatanganan MoU Kerja sama Bidang Logistik dan Industri Pertahanan". https://www.kemhan.go.id/pothan/2020/03/03/penandatanganan-mou-kerja sama-bidang-logistik-dan-industri-pertahanan.html, diakses pada 4 Oktober.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Purwanto, Didik. “Ini Kunci Sukses Filipina Jadi Terbaik Se-Asia,” http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/10/06/1510112/, diakses pada 8 November 2022

Republik Merdeka, “PT PAL Jual 2 Unit Kapal Perang SSV ke Filipina”. https://ekbis.rmol.id/read/2014/05/21/156086/pt-pal-jual-2-unit-kapal-perang-ssv-ke-filipina. diakses pada 16 Agustus 2022.

Riski, Petrus. “PT PAL Ekspor Perdana Kapal Perang ke Filipina”. dalam https://www.voaindonesia.com/a/pt-pal-ekspor-perdana-kapal-perang-ke-filipina/3320818.html. diakses pada 1 Juni 2022.

Sanju, Pascal S Bin. “Ini Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional Atas Laut Cina Selatan”. http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/07/ini-putusanmahkamah-arbitrase-internasional-atas-laut-cina-selatan. diakses pada 8 November 2022

Zul. “Menangkan Pesanan Kapal Perang dari Filipina, RI Kalahkan Sang ‘Guru’”. https://finance.detik.com/industri/d-2812019/menangkan-pesanan-kapal-perang-dari-filipina-ri-kalahkan-sang-guru. diakses pada 16 Agustus 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/